

**PENGARUH EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI MANAJEMEN KEUANGAN
DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI (SUATU TELAAH
EMPIRIK DI KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 1990 – 2005)**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-2**

**Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan
Konsentrasi
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah**



Oleh :

**Sri Wahyuni
S.4205014**

**PROGRAM STUDI MAGISTER
EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2007**

**PENGARUH EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI MANAJEMEN
KEUANGAN DAERAH TERHADAP**

PERTUMBUHAN EKONOMI
Suatu Telaah Empirik di Kabupaten Karanganyar
Tahun 1990 – 2005

Oleh :

SRI WAHYUNI
S.4205014

Telah disetujui oleh Tim Pembimbing
Pada tanggal Pebruari 2008

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. J.J. Sarungu, M.S.
NIP. 130 890 434

Drs.Mulyanto, ME
NIP. 132 046 019

Ketua Program
Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan
Universitas Sebelas Maret
Surakarta

Dr. J.J. Sarungu, M.S.
NIP. 130 890 434

**PENGARUH EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI MANAJEMEN
KEUANGAN DAERAH TERHADAP**

PERTUMBUHAN EKONOMI
Suatu Telaah Empirik di Kabupaten Karanganyar
Tahun 1990 – 2005

Disusun Oleh :

SRI WAHYUNI
S.4205014

Telah disetujui dan disahkan oleh Tim Penguji

Pada tanggal Pebruari 2008

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Tim Penguji	Drs. Akhmad Daerobi, MS
Pembimbing I	Dr. J.J. Sarungu, M.S.
Pembimbing II	Drs.Mulyanto, ME

Mengetahui,	Surakarta,
Direktur PPs UNS	Ketua Program Studi Magister
	Ekonomi dan Studi Pembangunan

Prof. Drs. Suranto, M.Sc, Ph.D
NIP. 130 890 434

Dr. J.J. Sarungu, M.S.
NIP. 130 890 434

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas bimbingan dan petunjuk-Nya penulis selalu diberikan kekuatan dan keteguhan iman dan kepercayaan diri sehingga dapat menyelesaikan tesis yang berjudul PENGARUH EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI Suatu Telaah Empirik di Kabupaten Karanganyar Tahun 1990 – 2005.

Tentunya tesis ini masih jauh dari sempurna, karena keterbatasan penulis dalam mengembangkan topik penelitian. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut. Penyusunan tesis ini tidak lepas dari hambatan dan rintangan, namun beban itu terasa kian ringan ketika terulur tangan-tangan penuh keikhlasan dan ketulusan dalam memberikan bantuan kepada penulis. Maka dari itu dengan segala kerendahaan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. JJ. Sarungu, MS selaku Direktur Program Studi Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Sebelas Maret Surakarta beserta Staf Pengelola.
2. Bapak Dr. JJ. Sarungu, MS selaku Pembimbing I yang dengan penuh kesabaran memberikan motivasi, bimbingan dan pengarahan kepada penulis sehingga tesis ini diselesaikan.
3. Bapak Drs. Mulyanto, ME selaku pembimbing II yang dengan penuh kesabaran memberikan waktu, motivasi, bimbingan dan pengarahan kepada penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

4. Bapak Drs. Akhmad Daerobi, MS selaku ketua tim penguji yang telah memberikan pengarahan dan masukan.
5. Segenap Dosen Program Studi Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Sebelas Maret Surakarta.
6. Segenap karyawan dan karyawan Program Studi Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Sebelas Maret Surakarta.
7. Seluruh jajaran pegawai Bappeda Kabupaten Karanganyar.
8. Seluruh jajaran pegawai BPS Kabupaten Karanganyar.
9. Ibu dan Almarhum Bapak yang telah mendidiku dan membimbingku menjadi anak yang baik.
10. Suamiku tercinta Mas Aris Ardiyanto, SP yang telah memberikan semangat serta ketulusan kasih sayang untuk penulis.
11. Adikku Henny, Devi dan Rudi yang selalu membantu dengan do'a dan semangat untuk penulis.
12. Teman-teman MESP angkatan 2005 terima kasih atas kerjasamanya sukses untuk kita semua.

Serta semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu kelancaran tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Surakarta, Pebruari 2008

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
ABSTRAK	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	18
C. Tujuan Penelitian	18
D. Manfaat Penelitian	19
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Pustaka	20
1 Landasan Teori	20
2 Manajemen Keuangan Daerah	23
3 Pertumbuhan Ekonomi Daerah	25
4 Konsep dan Definisi PDRB	26
5 Pembangunan Seimbang dan Tidak Seimbang	27
6 Investasi	30
7 Hubungan Antara Variabel	33

B. Hasil Penelitian Terdahulu	34
C. Kerangka Konseptual	36
D. Hipotesis	38
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	39
B. Unit Analisis	39
C. Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data	39
D. Metode dan Tehnik Analisis Data	40
 BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Kabupaten Karanganyar	45
1. Keadaan Geografis	45
2. Kependudukan	46
3. Pertumbuhan Ekonomi	47
B. Deskripsi Variabel Penelitian	48
1. Efektifitas Manajemen Keuangan Daerah.....	48
2. Efisiensi Manajemen Keuangan Daerah.....	50
3. Pertumbuhan Ekonomi	52
C. Hasil Pengolahan Data	61
1. Hasil Pengolahan Data Pengaruh Efektivitas Manajemen Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	61
2. Hasil Pengolahan Data Pengaruh Efisiensi Manajemen Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	62
3. Hasil Pengolahan Data Pengaruh Efektivitas dan Efisiensi Manajemen Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Dummy Variabel Krisis Ekonomi 1997	63

D. Hasil Pengujian Hipotesis	65
1. Hasil Uji Pengaruh Efektivitas Manajemen Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	65
2. Hasil Uji Pengaruh Efisiensi Manajemen Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	66
3. Hasil Uji Pengaruh Efektivitas dan Efisiensi Manajemen Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Dummy Variabel Krisis Ekonomi 1997	66
E. Pembahasan Hasil Penelitian	69
1. Pengaruh Efektivitas Manajemen Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	69
2. Pengaruh Efisiensi Manajemen Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	70
3. Peran Krisis Ekonomi Dalam Pengaruh Efektivitas dan Efisiensi Manajemen Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	71
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
C. Implikasi Penelitian	78
1. Implikasi Teoritik	78
2. Implikasi Kebijakan	79
 DAFTAR PUSTAKA	 80
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Kostan dan Perhitungan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Karanganyar Tahun 1990 – 2005 dengan Dasar Tahun 1983	14
Tabel 1.2	Data Pendapatan Daerah dan Pengeluaran Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 1990 – 2005	16
Tabel 1.3	Data Target APBD dan Realisasi APBD Kabupaten Karanganyar Tahun 1990 – 2005	17
Tabel 2.1	Tabel Kriteria Kinerja Keuangan	33
Tabel 2.2	Tabel Kriteria Kinerja Keuangan	34
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Kabupaten Karanganyar Menurut Jenis Kelamin Dan Kecamatan Tahun 2005	46
Tabel 4.2	Luas Wilayah Distribusi Kepadatan dan Pertumbuhan di Rinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Karanganyar Tahun 2004	47
Tabel 4.3	PDRB Atas Harga Konstan Tahun 1983 dan Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Karanganyar Tahun 1990 – 2005	48
Tabel 4.4	Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Konstan dan Hasil Perhitungan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Karanganyar Tahun 1990 – 2005 dengan Dasar Tahun 1983	54
Tabel 4.5	Data Pendapatan Daerah dan Pengeluaran Belanja Daerah serta Perhitungan Efisiensi Manajemen Keuangan Daerah Tahun 1990 – 2005	55
Tabel 4.6	Data Target APBD dan Realisasi APBD serta Perhitungan Efektivitas Manajemen Keuangan Daerah Tahun 1990 – 2005	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Skema Kerangka Pemikiran	36
Gambar 4.1	Grafik Efektivitas	51
Gambar 4.2	Grafik Efisiensi	52
Gambar 4.3	Grafik Pertumbuhan Ekonomi	53

ABSTRAK

SRI WAHYUNI

S.4205014

PENGARUH EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI

Suatu Telaah Empirik di Kabupaten Karanganyar

Tahun 1990 – 2005

Masalah yang hendak dicari jawabanya dalam penelitian ini adalah pengaruh efektivitas dan efisiensi manajemen keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karanganyar. Sehubungan dengan masalah tersebut diajukan hipotesis sebagai berikut (i) Variabel efektivitas manajemen keuangan daerah diduga berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (ii) Variabel efisiensi manajemen keuangan daerah diduga berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (iii) Masa krisis ekonomi diduga berperan signifikan dalam pengaruh variabel efektivitas dan efisiensi manajemen keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.

Sejalan dengan masalah tersebut dan hipotesis penelitian maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Metode Penelitian Data Sekunder di Kabupaten Karanganyar.

Hasil analisis menunjukkan bahwa, variabel efektivitas menurut kriteria kinerja keuangan di Kabupaten Karanganyar relatif sudah efektif, dan variabel efisiensi menurut kriteria kinerja keuangan di Kabupaten Karanganyar masih kurang efisien. Hasil pengolahan data menggunakan analisis eviiew menunjukkan bahwa (i) Variabel efektivitas manajemen keuangan daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (ii) Variabel efisiensi manajemen keuangan daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (iii) Dummy berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari bukti – bukti tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel efektivitas dan efisiensi manajemen keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karanganyar pada tahun penelitian ber pengaruh tidak signifikan secara statistik, peran masa krisis ekonomi dalam pengaruh variabel efektivitas dan efisiensi manajemen keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi berpengaruh tidak signifikan secara statistik.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar hendaknya lebih meningkatkan variabel efektivitas dan efisiensi manajemen keuangan daerah, pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar hendaknya mampu menentukan kebijakan serta langkah strategis guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen keuangan daerah pada periode mendatang.

Keyword : variabel efektivitas, variabel efisiensi, pertumbuhan ekonomi, masa krisis ekonomi.

BAB I **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi ekonomi dan perubahan dalam konsep perencanaan nasional, terutama pelaksanaan otonomi daerah mengakibatkan penyusunan baru mengenai manajemen / pengelolaan keuangan daerah. Hal ini merupakan salah satu bentuk bagaimana pemerintah daerah mempersiapkan suatu era baru dalam era globalisasi ekonomi internasional dan era pelaksanaan otonomi daerah dalam tingkat nasional.

Menurut Shah (1997) perubahan tersebut diatas merupakan *trend* di banyak negara dan penguatan ekonomi ini merupakan sebagian dari pergeseran struktur pemerintahan untuk menciptakan *new strategy* dalam menghadapi era *new game* dan *new rules* di abad 21 dimana kekuatan dan keinginan global sudah semakin kuat. Shah menerangkan ada keinginan yang kuat untuk menggeser negara kesatuan ke arah bentuk federasi atau konfederasi, yang lebih mengglobal sekaligus melokal. Dengan syarat itu pemerintah pusat diharapkan akan berorientasi pada *leadership* dari pada menjadi manajer. Dalam operasionalisasi fungsi dan peran pemerintah pusat pun mulai mengikis budaya birokratis digantikan oleh budaya partisipatif yang reponsif dan akuntabel. Oleh karena itu budaya pemerintah masa depan lebih terbuka dan cepat dalam suasana kompetisi yang sehat, yang pada nantinya diharapkan akan membawa perubahan mendasar pada lingkungan legal dan regulasi lainnya, yaitu dari tidak toleran terhadap resiko menjadi lebih leluasa untuk berhasil atau gagal (Shah (1997) dalam Mardiasmo, 2004: 66).

Pergeseran pada struktur pemerintahan akan membawa dampak luar biasa pada sektor publik yaitu bagaimana mengharmoniskan antara sistem nilai, misi dan tujuan dari sektor public, lingkungan otorisasi yang dihadapinya dengan kapasitas operasional unit kerja yang bersangkutan (**Shah (1997) dalam Mardiasmo, 2004: 67**) Upaya itu sangat krusial di negara yang sedang berkembang karena sektor publik biasanya tidak memiliki sistem nilai, misi, dan tujuan yang kuat dan jelas menghadapi otoritas yang kurang kapabel dalam menterjemahkan sistem nilai, misi dan tujuan dalam kebijakan publik yang relevan dan realistis. Keadaan ini semakin diperparah oleh model birokrasi yang lamban dan sentralistis sehingga kapasitas operasional dari unit kerja menjadi tidak berfungsi sama sekali.

Dalam kasus negara Indonesia harmonisasi itu mulai dilaksanakan dengan kebijakan otonomi luas, tetapi undang-undang tersebut hanyalah *necessary condition* dan belum mencukupi. Penyebabnya masih banyak peraturan-peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan yang terkait harus diformulasikan secara hati-hati agar pemerintah daerah otonom yang ekonomis, efisien, efektif, akuntabel, transparan dan reponsif dapat diciptakan dengan segera. Salah satu peraturan pemerintah itu adalah peraturan pemerintah tentang keuangan daerah, yang mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan salah satu instrumen utama bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensinya dalam mendorong proses pembangunan daerah.

Untuk menghadapi globalisasi ekonomi dan pembangunan nasional yang menekankan pada pelaksanaan ekonomi daerah secara luas, nyata dan

bertanggung jawab, maka perlu disusun suatu rumusan baru yang berkaitan dengan manajemen keuangan daerah. Hal ini adalah salah satu bentuk bagaimana pemerintah daerah mempersiapkan suatu pra kondisi dalam perekonomian internasional dan perekonomian nasional.

Secara garis besar manajemen keuangan daerah dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu : (i) Manajemen penerimaan daerah; dan (ii) Manajemen pengeluaran daerah. Evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan daerah mempunyai implikasi yang sangat luas. Kedua komponen tersebut akan sangat menentukan kedudukan suatu pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah (**Mardiasmo, 2004: 104**)

Konsekuensi logis pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 menyebabkan perubahan dalam manajemen keuangan daerah. Perubahan tersebut antara lain adalah perlunya dilakukan reformasi anggaran (*budgeting reform*). Reformasi anggaran meliputi proses penyusunan, pengesahan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran. Berbeda dengan UU No. 5 Tahun 1974 ; penyusunan, pengesahan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004 adalah tidak diperlukannya lagi pengesahan dari Menteri Dalam Negeri untuk APBD Provinsi dan pengesahan Gubernur untuk APBD Kabupaten / Kota, melainkan cukup pengesahan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui Peraturan Daerah (Perda).

Aspek utama *budgeting reform* adalah perubahan dari *traditional budget* ke *performance budget* (**Mardiasmo, 2004: 104**). *Traditional budget*

didominasi oleh penyusunan anggaran yang bersifat *line-item* dan *incrementalism* yaitu proses penyusunan anggaran yang hanya didasarkan pada besarnya realisasi anggaran tahun sebelumnya, konsekuensinya tidak ada perubahan mendasar atas anggaran baru. Hal ini sering kali bertentangan dengan kebutuhan riil dan kepentingan masyarakat. Dengan basis seperti ini, APBD masih terlalu berat menahan arahan, batasan, serta orientasi subordinasi kepentingan pemerintah atasan. Hal tersebut menunjukkan terlalu dominannya peran pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Besarnya dominasi ini seringkali mematikan inisiatif dan prakarsa pemerintah daerah, sehingga memunculkan fenomena pemenuhan petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis dari pemerintah pusat.

Performance budget pada dasarnya adalah sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut harus mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, yang berarti harus berorientasi pada kepentingan publik. Merupakan kebutuhan masyarakat daerah untuk menyelenggarakan otonomi secara luas, nyata dan bertanggung jawab dan otonomi daerah harus dipahami sebagai hak atau kewenangan masyarakat daerah untuk mengelola dan mengatur urusannya sendiri. Aspek peran pemerintah daerah tidak lagi merupakan alat kepentingan pemerintah pusat belaka melainkan alat untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah.

Prinsip-prinsip yang mendasari pengelolaan keuangan daerah tersebut adalah transparansi, akuntabilitas, dan *value for money* (Mardiasmo, 2004: 105). Transparansi keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan,

pelaksanaan anggaran daerah. Transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat.

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

Value for money berarti diterapkan 3 (tiga) prinsip dalam proses penganggaran yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang paling murah. Efisiensi berarti penggunaan dana masyarakat (*publik money*) tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna). Efektivitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik.

Krisis ekonomi dan kepercayaan yang melanda Indonesia memberikan dampak positif dan dampak negatif bagi upaya peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Di satu sisi krisis tersebut telah membawa dampak yang luar biasa pada tingkat kemiskinan, namun disisi lain krisis tersebut dapat juga memberi “berkah tersembunyi” (*blessing in disguised*) bagi upaya peningkatan taraf hidup seluruh rakyat Indonesia di masa yang akan datang. Dengan alasan adanya Krisis ekonomi dan kepercayaan yang dialami telah

membuka jalan bagi munculnya reformasi total di seluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia. Tema sentral reformasi total tersebut adalah mewujudkan masyarakat madani, tercipta *good governance*, dan mengembangkan model pembangunan yang berkeadilan. Di samping itu, reformasi ini telah juga memunculkan sikap keterbukaan dan fleksibilitas sistem politik dan kelembagaan sosial, sehingga mempermudah proses pembangunan dan modernisasi lingkungan legal dan regulasi untuk pembaruan paradigma di berbagai bidang kehidupan.

Salah satu unsur reformasi total itu adalah tuntutan pemberian otonomi yang luas kepada daerah kabupaten dan kota. Tuntutan seperti ini adalah wajar, paling tidak untuk dua alasan. Pertama intervensi pemerintah pusat terlalu besar di masa yang lalu menimbulkan rendahnya kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah dalam mendorong proses pembangunan dan kehidupan demokrasi di daerah (**Mardiasmo, (2004: 4)**). Arahan dan *statutory requirement* yang terlalu besar dari pemerintah pusat tersebut menyebabkan inisiatif dan prakarsa daerah cenderung mati sehingga pemerintah daerah seringkali menjadikan pemenuhan peraturan sebagai tujuan, dan bukan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Besarnya arahan dari pemerintah pusat itu didasarkan pada dua alasan utama yaitu untuk menjamin stabilitas nasional, dan karena kondisi sumber daya manusia daerah yang dirasa masih relatif lemah. Karena dua alasan ini, sentralisasi otoritas dipandang sebagai prasyarat untuk menciptakan persatuan dan kesatuan nasional serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada awalnya pandangan ini terbukti benar, sepanjang tahun 70-an dan 80-an misalnya, Indonesia mengalami pertumbuhan yang berkelanjutan dan stabilitas politik yang mantap (**Shah (1997) dalam Mardiasmo, 2004: 4**) Namun dalam jangka

panjang, sentralisasi seperti itu telah memunculkan masalah rendahnya akuntabilitas, memperlambat pembangunan dan infrastruktur sosial, rendahnya tingkat pengembalian proyek-proyek publik, serta memperlambat pengembangan kelembagaan sosial ekonomi di daerah (**Shah (1997) dalam Mardiasmo, 2004: 4**). Kedua tuntutan pembelian otonomi itu juga muncul sebagai jawaban untuk memasuki area *new game* yang membawa *new rules* pada semua aspek kehidupan manusia di masa yang akan datang. Di era seperti ini dimana *globalization cascade* sudah semakin meluas, pemerintah akan semakin kehilangan kendali pada banyak persoalan, seperti pada perdagangan internasional, informasi dan ide, serta transaksi keuangan. Di masa depan pemerintah sudah terlalu besar untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kecil tetapi terlalu kecil untuk dapat menyelesaikan semua masalah yang dihadapi oleh masyarakat (**Shah (1997) dalam Mardiasmo, 2004: 4**).

Untuk menghadapi *new game* yang penuh dengan *new rules* tersebut dibutuhkan *new strategy*. Berbagai ketetapan MPR yang telah dihasilkan melalui Sidang Istimewa yang selalu merupakan *new strategy* kita untuk keluar dari krisis ekonomi dan kepercayaan serta menghadapi *globalization cascade*. Salah satu Ketetapan MPR tersebut adalah Tap MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang “Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Tap MPR tersebut merupakan landasan hukum keluarnya UU No 22 Tahun 1999 dan UU No 25 Tahun 1999 yang sekarang sudah dirubah/ diganti dengan UU No 32 Tahun 2004 dan UU No 33 Tahun 2004. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah. Dimana UU No 33 Tahun 2004 dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada Pemerintah Daerah yang diatur dalam undang-undang tentang Pemerintahan Daerah. Pendanaan yang menganut prinsip *money follow function*, bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pemerintahan. Agar terlaksana efektif dan efisien kewenangan daerah dibiayai dari APBD. Sedang dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah dinyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Agar mampu menjalankan perannya, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menjalankan otonomi daerah. Misi utama kedua Undang-undang tersebut adalah desentralisasi, dimana desentralisasi tidak hanya berarti pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah yang lebih rendah, tetapi juga pelimpahan beberapa wewenang pemerintah ke pihak swasta dalam bentuk privatisasi. Pemerintah pada berbagai tingkatan harus bisa menjadi katalis, fokus pada pemberian pengarahan bukan pada produksi pelayanan publik. Produksi pelayanan publik harus dijadikan pengecualian dan bukan keharusan. Pada masa yang akan datang, pemerintah pada semua tingkatan harus fokus pada fungsi-fungsi dasarnya yaitu penciptaan dan modernisasi lingkungan legal dan regulasi, pengembangan suasana yang kondusif bagi proses alokasi sumber daya yang efisien, pengembangan kualitas sumberdaya manusia dan infrastuktur,

melindungi orang-orang yang rentan secara fisik maupun non fisik, serta meningkatkan dan konservasi daya dukung lingkungan hidup (**World Bank (1999), dalam Mardiasmo, 2004: 5).**

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa pengembangan otonomi pada daerah kabupaten dan kota diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keaneka-ragaman Daerah.

Otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten dan kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung-jawab kepada pemerintah daerah secara proposional. Artinya pelimpahan tanggungjawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian, dan pemanfaatan dan sumberdaya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dalam upaya pemberdayaan pemerintah daerah ini, maka perspektif perubahan yang diinginkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah adalah sebagai berikut (**Mardiasmo, 2004: 8**) :

1. Pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik (*public oriented*). Hal ini tidak saja terlihat pada besarnya porsi pengalokasian anggaran untuk kepentingan publik, tetapi juga terlihat pada besarnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan keuangan daerah.
2. Kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dan anggaran daerah pada khususnya.

3. Desentralisasi pengelolaan keuangan dan kejelasan peran para partisipan yang terkait dalam pengelolaan anggaran, seperti DPRD, KDH, Sekda dan perangkat daerah lainnya.
4. Kerangka hukum dan administrasi bagi pembiayaan, investasi dan pengelolaan uang daerah berdasarkan kaidah mekanisme pasar, *value for money*, transparansi dan akuntabilitas.
5. kejelasan tentang kedudukan keuangan DPRD, KDH dan PNS Daerah, baik ratio maupun dasar pertimbangannya.
6. Ketentuan tentang bentuk dan struktur anggaran, anggaran kinerja dan anggaran multi-tahunan.
7. Prinsip pengadaan dan pengelolaan barang daerah yang lebih profesional.
8. Prinsip akuntansi pemerintah daerah, laporan keuangan, peran DPRD dan akuntan publik dalam pengawasan, pemberian opini dan riting kinerja anggaran dan transparansi informasi anggaran kepada publik.
9. aspek pembinaan dan pengawasan yang meliputi batasan pembinaan peran asosiasi dan peran anggota masyarakat guna pengembangan profesionalisme aparat pemerintah daerah.
10. Pengembangan sistem informasi keuangan daerah untuk menyediakan informasi anggaran yang akurat dan pengembangan komitmen pemerintah daerah terhadap penyebaran informasi sehingga memudahkan pelaporan dan pengendalian serta mempermudah mendapatkan informasi.

Selama ini kapabilitas dan efektifitas Pemerintah Daerah dirasakan masih terlalu lemah. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa pada

umumnya unit kerja Pemerintah Daerah belum menjalankan fungsi dan perannya secara efisien. Pemborosan adalah fenomena umum yang terjadi di berbagai unit kerja Pemerintah Daerah. Kondisi seperti ini muncul karena pendekatan umum yang digunakan dalam penentuan besar alokasi dana untuk tiap kegiatan adalah pendekatan *incrementalism*, yang didasarkan pada perubahan satu atau lebih variabel yang bersifat umum, seperti tingkat inflasi dan jumlah penduduk. Bila tingkat inflasi dan jumlah penduduk meningkat maka besar alokasi dana untuk tiap kegiatan yang sudah tertentu akan meningkat dari besar alokasi semula.

Dari sudut pandang efektifitas, metode penentuan prioritas untuk tiap kegiatan pemerintahan di daerah masih belum baik. Pemerintah Daerah umumnya belum melakukan identifikasi kegiatan untuk penyusunan prioritas tetapi lebih banyak menyesuaikan dengan arahan prioritas kebijakan Pemerintah Pusat. Akibat orientasi seperti ini maka tuntutan dan kebutuhan masyarakat setempat akan cenderung tarabaikan.

Dalam situasi seperti itu, menyebabkan banyak layanan publik dijalankan secara tidak efisien dan kurang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan publik, sementara dana pada Anggaran Daerah yang pada dasarnya merupakan dana publik (*publik money*), habis dibelanjakan seluruhnya. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut cenderung akan memperlemah peran Pemerintah Daerah sebagai stimulator, fasilitator, koordinator dan *entrepreneur* (wirausaha) dalam proses Pembangunan Daerah. Selain tidak efisien, program kerja yang dijalankan belum dibangun berdasarkan basis tuntutan dan kebutuhan riil di lapangan.

Salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik adalah melalui penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang komprehensif. Dalam era otonomi daerah dan desentralisasi, pemerintah daerah diharapkan dapat menyajikan laporan keuangan yang terdiri atas Laporan Surplus / Defisit, Laporan Realisasi Anggaran (Perhitungan APBD), Laporan Aliran Kas dan Neraca. Laporan Keuangan tersebut merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik dan merupakan salah satu alat ukur kinerja finansial pemerintah daerah. Bagi pihak eksternal, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang berisi informasi keuangan daerah akan digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Sedangkan bagi pihak intern pemerintah daerah laporan keuangan tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk penilaian kinerja (**Mardiasmo, 2004: 36-37**).

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang merupakan keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi di suatu daerah dalam periode tertentu, biasanya satu tahun. Kinerja perekonomian setiap daerah dapat diukur dengan pertumbuhan ekonomi daerah (laju pertumbuhan PDRB menurut harga konstan).

Dilihat dari pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar sesudah masa krisis ekonomi mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena sektor industri mengurangi kegiatan produksinya.

Secara umum kondisi perekonomian setiap Kabupaten/kota di wilayah ekskarisidenan Surakarta cukup stabil, hal ini ditunjukkan atas nilai PDRB ADHK pada umumnya mengalami pertumbuhan yang positif.

Kabupaten Karanganyar sebagai salah satu Kabupaten di wilayah eks-karisidenan Surakarta mempunyai laju pertumbuhan ekonomi paling tinggi yaitu sebesar 5,49% sedang laju pertumbuhan ekonomi terendah di Kabupaten Wonogiri yaitu sebesar 4,00% pada tahun 2005, meskipun demikian perbedaan pertumbuhan ekonomi antar daerah sewilayah eks-Karisedenan Surakarta masih relatif kecil.

Tabel 1.1. Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Konstan dan Hasil Perhitungan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Karanganyar Tahun 1990 - 2005 dengan dasar tahun 1983.

TAHUN	Atas Dasar Harga Konstan	
	PDRB (Rp)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
(1)	(2)	(3)

1990	469.424,46	19,38
1991	580.087,13	18,52
1992	839.872,53	44,78
1993	892.104,44	6,22
1994	1.047.286,13	17,39
1995	1.120.785,44	7,02
1996	1.210.112,30	7,97
1997	1.255.719,21	3,77
1998	1.109.425,03	(- 11,65)
1999	1.141.544,82	2,89
2000	1.193.085,08	4,51
2001	1.210.084,63	1,42
2002	1.248.686,47	3,19
2003	1.290.163,05	3,32
2004	1.342.109,36	4,03
2005	1.475.029,10	9,9

Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar

Selama tahun 1997, kondisi ekonomi di Indonesia mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Hal ini sebagai dampak krisis ekonomi yang melanda sejak pertengahan tahun 1997. Kabupaten Karanganyar sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah tidak luput dari dampak krisis ekonomi tersebut. Akibatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar selama tahun 1997 hanya tumbuh sebesar 3,77% lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi tahun 1996 yaitu sebesar 7,97%. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi ini masih lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi provinsi Jawa Tengah yang sebesar 3,03%.

Pertumbuhan ekonomi tersebut tidak terlepas dari sumbangan pertumbuhan dari sektor-sektor ekonomi yang ada. Posisi dan kondisi

Kabupaten Karanganyar sampai sekarang sebagai daerah agraris walaupun secara berangsur- angsur mulai bergeser ke sektor industri pengolahan. Hal ini dapat dilihat bahwa sumbangan yang tertinggi berasal dari sektor industri pengolahan. Sektor Industri Pengolahan merupakan sektor yang dominan kedua setelah sektor pertanian. Selama Pelita V sektor ini mengalami pergeseran yang cukup berarti sehingga sumbanganya terhadap PDRB mendekati sektor pertanian dimana pada tahun 1989 sumbangan terhadap PDRB sebesar 22,30% dan pada tahun 1993 sebesar 25,28% naik sebesar 2,98% kenaikan di sektor Industri Pengolahan ini disebabkan oleh naiknya produksi di sub sektor Industri besar dan sedang. Apabila dilihat menurut harga konstan 1989 cukup besar yaitu 8,05% (23,83% th 1989 dan 31,88% th 1993).

Sampai dengan tahun 2005, kelompok sektor sekunder terutama sektor industri pengolahan masih memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Karanganyar yaitu sebesar 52,55% kemudian disusul kelompok sektor primer terutama sektor pertanian sebesar 19,68% dan kelompok tersier terutama sektor perdagangan sebesar 10,33% dan sektor jasa-jasa sebesar 7,74%.

Untuk menunjang kelancaran operasional kegiatan perangkat daerah, maka Pemerintah Daerah melalui APBD telah mengalokasikan anggaran setiap tahun sesuai dengan prioritas dan kemampuan yang ada. Dalam rangka upaya untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab khususnya dibidang keuangan, telah ditempuh kebijaksanaan, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, pemerintah telah mengatur

tentang pengelolaan, pertanggung jawaban dan pengawasan Keuangan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah dan peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi. Pelaksanaan APBD di Kabupaten Karanganyar telah dilaksanakan sesuai dengan manajemen keuangan daerah yaitu anggaran berimbang dan dinamis, kemandirian, efektivitas dan efisiensi, prioritas serta disiplin anggaran.

Tabel 1.2. Data Pendapatan Daerah dan Pengeluaran Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 1990 – 2005

Tahun	Pendapatan Daerah (Rp.)	Pengeluaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)
1990	11.430.584,00	10.817.391,00
1991	13.232.772,00	12.940.724,00
1992	16.826.363,00	16.517.169,00
1993	18.737.633,00	18.046.001,00
1994	21.818.242,00	23.388.378,00
1995	27.980.706,00	29.466.124,30
1996	31.261.513,00	34.848.742,80
1997	38.565.358,26	38.416.358,68
1998	66.766.181,12	64.109.102,00
1999	90.323.040,50	85.601.664,36
2000	83.832.297,42	79.496.741,90
2001	253.490.644,73	238.712.245,18
2002	253.490.644,73	89.277.017,20
2003	357.223.479,55	348.659.939,79
2004	373.132.453,10	351.188.875,87
2005	391.630.897,62	388.737.613,20

Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar

Kabupaten Karanganyar rencana pendapatan daerah yang sudah ditetapkan dalam APBD dapat dicapai setiap tahunnya, bahkan realisasinya selalu meningkat. Pada tahun 1990 pendapatan daerah Rp. 11.430.584,00 dan dalam tahun 2005 angka pendapatan daerah menjadi sebesar Rp. 391.630.897,62.

Untuk pengeluaran belanja daerah setiap tahunnya meningkat, dalam tahun 1990 angka pengeluaran belanja daerah Kabupaten Karanganyar sebesar Rp. 10.817.391,00 dan dalam tahun 2005 angka pengeluaran belanja daerah menjadi Rp.388.737.613,20. Pengeluaran belanja daerah direalisasikan untuk Belanja Rutin /Belanja Aparatur dan Belanja Pembangunan /Belanja Publik.

Tabel 1.3. Data Target APBD dan realisasi APBD Kabupaten Karanganyar Tahun 1990 – 2005

Tahun	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)
(1)	(2)	(3)
1990	22.247.977,00	22.247.977,00
1991	26.173.499,00	26.173.499,00
1992	33.343.532,00	33.343.532,00
1993	36.756.222,00	36.756.222,00
1994	43.112.580.000,00	45.206.620.000,00
1995	54.948.039.800,00	57.446.830.300,00
1996	64.292.957.800,00	66.110.255.800,00
1997	78.464.373.030,00	76.941.743.950,00
1998	126.469.851.000,00	130.827.777.874,00

1999	181.627.097.340,00	176.524.704.869,00
2000	169.781.447.916,00	163.329.039.322,00
2001	481.446.081.600,00	492.207.880.900,00
2002	573.887.634.000,00	215.005.723.497,00
2003	705.869.873.423,00	705.883.419.347,00
2004	741.357.487.760,00	724.321.328.978,00
2005	677.750.864.702,00	730.368.510.831,00

Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar

Anggaran belanja pembangunan dianggarkan dan direalisasikan untuk pembangunan di sektor ekonomi. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar untuk target dan realisasi tahun 1990 sampai dengan 2005, setiap tahun meningkat, dalam tahun 1990 angka APBD untuk target Rp. 22.247.977,00 dan realisasi Rp. 22.247.977,00 dan dalam tahun 2005 angka APBD menjadi untuk target Rp. 677.750.864.70 dan realisasi Rp. 730.368.510.831,00.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka pertimbangan pokok penelitian yang diajukan adalah bagaimana pengaruh manajemen keuangan daerah terhadap kinerja ekonomi daerah Kabupaten Karanganyar selama periode 1990 – 2005.

Bagaimana pengaruh variabel efektivitas manajemen keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Karanganyar selama penelitian ?

Bagaimana pengaruh variabel efisiensi manajemen keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Karanganyar selama penelitian?

Bagaimana efek krisis ekonomi berperan dalam studi pengaruh variabel efektivitas dan variabel efisiensi manajemen keuangan daerah yang diukur dengan Dummy terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Karanganyar?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai antar lain adalah untuk mengetahui sejauh mana :

Pengaruh variabel efektivitas manajemen keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Karanganyar.

Pengaruh variabel efisiensi manajemen keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Karanganyar.

Efek krisis ekonomi berperan / mempunyai peran dalam studi pengaruh variabel efektivitas dan variabel efisiensi manajemen keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Karanganyar.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberi masukan dan bahan pertimbangan dalam menyempurnakan manajemen keuangan daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Karanganyar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka

1. Landasan Teori

Pembahasan mengenai ekonomi keuangan daerah, mencakup masalah peranan sektor publik (pemerintah) dalam mengelola pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran daerah). Akan tetapi tidak hanya masalah pembiayaan tetapi secara keseluruhan juga menekankan pada tingkat dan alokasi sumber daya yang digunakan, sebagaimana distribusi pendapatan di antaranya konsumen. Meskipun permasalahan pada awalnya hanya merujuk pada pembiayaan sektor publik, akan tetapi dalam kenyataannya hal ini juga berkaitan dengan masalah aspek-aspek pembiayaan. Lebih lanjut lagi dapat dikatakan bahwa aspek pembiayaan tidak hanya mencakup ekonomi sektor publik saja akan tetapi juga memasukan sektor swasta di dalamnya dan interaksi diantara keduanya.

Dalam kaitannya dengan pemerintah lokal, Sumodiningrat (1999) menyatakan bahwa APBD adalah alat untuk menjalankan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab dan merupakan rencana operasional pemerintah daerah yang menggambarkan pengeluaran untuk kegiatan dan proyek daerah dalam suatu anggaran tertentu dan sumber penerimaan daerah untuk mencukupi pengeluaran tersebut (**H.Darsil, 2004: 82**).

Pada dasarnya anggaran daerah dan anggaran pusat tidaklah berbeda. Sumber penerimaan bisa berasal dari pajak, laba perusahaan ataupun pinjaman. Namun ada satu sumber penerimaan yang berbeda, yaitu *intergovernmental grant*.¹ 20 kaitanya dengan pajak, dimana agar

suatu jenis pajak dapat menjadi pajak daerah ada beberapa syarat yang harus dipenuhi antara lain **(Cullis dan Jones, 1992: 303-304) :**

1. Dasar penetapan pajaknya harus bersifat lugas dan fair
2. Memadai secara ekonomi
3. Dampaknya bersifat lokal
4. Pajak tersebut harus dapat ditingkatkan dan hasilnya reliabel.
5. Harus memiliki dampak pemerataan
6. Pajak tersebut harus dapat dipahami
7. Pajak tersebut harus dapat meningkatkan akuntabilitas lokal

Sumber penerimaan daerah yang lain perlu mendapat perlu mendapat penekanan *intergovernmental grants*. *Grant* yang dalam anggaran pusat merupakan pengeluaran maka dalam anggaran daerah menjadi pos penerimaan. Dilihat dari jenisnya maka grant dapat dijadikan menjadi dua garis besar yaitu *conditional/ catagorical grant* dan *unconditional / general grant*. *Coonditional grant* dapat bersifat *closed* atau *open*.

Struktur belanja Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (yang sudah diperbaiki dengan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah), serta Peraturan Pemerintah penjelasannya menyebutkan bahwa Belanja Daerah terdiri dari Belanja Aparatur dan Belanja Publik. Secara teknis hal itu juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006.

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah untuk meningkatkan pelayanan publik (*publik service*) dan memajukan

perekonomian daerah . Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu (**Mardiasmo, 2004: 59**) :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat ;
2. Menciptakan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya daerah, dan
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Tiga faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa adalah (**Michael P. Todaro, 2003: 92**) :

1. Akumulasi modal, meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik dan modal atau sumber daya manusia.
2. Pertumbuhan penduduk, yang akan memperbanyak jumlah angkatan kerja.
3. Kemajuan teknologi.

Menurut Kuznets, “pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas ditentukan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan), dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada. (**Michael P. Todaro, 2003: 99**).

Kuznets mengemukakan enam karakteristik atau ciri proses pertumbuhan ekonomi di hampir semua negara yang sekarang maju adalah **(Michael P.Todaro, 2003: 99-100) :**

1. Tingkat pertumbuhan output per kapita dan pertumbuhan penduduk yang tinggi.
2. Tingkat kenaikan produktivitas faktor total yang tinggi.
3. Tingkat transformasi struktural ekonomi yang tinggi.
4. Tingkat transformasi sosial dan ideologi yang tinggi.
5. Adanya kecenderungan negara-negara yang mulai atau sudah maju perekonomiannya untuk berusaha merambah bagian-bagian dunia lainnya sebagai daerah pemasaran dan sumber bahan baku yang baru.
6. Terbatasnya penyebaran pertumbuhan ekonomi .

2. Manajemen Keuangan Daerah

Ditinjau dari aspek efektivitas dan efisiensi manajemen keuangan daerah harus dilaksanakan, seperti yang ditulis **Hakim (1997)** berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa meningkatnya kemandirian daerah dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah diperlukan kinerja efektivitas yang tinggi. Hal ini akan menyebabkan semua aspek yang ada dapat memberikan hasil yang optimal dengan demikian daerah akan dapat membiayai dan mengurus rumah tangganya sendiri **(Hakim (1997) dalam H. Darsil, 2004: 43).**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dijelaskan :

1. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat (Pasal 66, ayat (1)).
2. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan serta fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian (Pasal 66, ayat (3)).

Manajemen keuangan pemerintah merupakan salah satu kunci penentu keberhasilan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka *nation and state building*. Adanya manajemen keuangan pemerintah yang baik akan menjamin tercapainya tujuan pembangunan. Dalam upaya perwujudan manajemen keuangan pemerintah yang baik, terdapat pula tuntutan yang semakin aksentuatif untuk mengakomodasi, menginkorporasi, bahkan mengedepankan nilai-nilai *good governance*.

Beberapa nilai yang relevan dan urgen untuk diperjuangkan adalah antara lain transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan dimaksud, disamping nilai-nilai efektivitas dan efisiensi. Pentingnya reformasi keuangan pemerintah dengan beberapa

bidang di atas sebagai fokusnya, dilatarbelakangi oleh beberapa pertimbangan strategis yang terutama diwakili oleh luasnya skala persoalan yang harus diatasi. Persoalan-persoalan dimaksud antara lain : *Pertama*, rendahnya efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan pemerintah. Karenanya, muncul tuntutan yang meluas untuk menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja. *Kedua*, tidak adanya skala prioritas yang terumuskan secara tegas dalam proses pengelolaan keuangan negara yang menimbulkan pemborosan sumber daya publik

3. Pertumbuhan Ekonomi Daerah

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai dasar, dimana dalam perhitungan ini digunakan tahun dasar 1983. PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi dari tahun ke tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Pertumbuhan PDRB yang positif dari tahun ke tahun menjadi

indikator laju pertumbuhan ekonomi (**BPS Kabupaten Karanganyar: 2004**).

4. Konsep dan Definisi PDRB

Dalam perekonomian setiap negara, masing-masing sektor tergantung pada sektor yang lain, satu dengan yang lain saling memerlukan baik dalam tenaga, bahan mentah maupun hasil akhirnya. Sektor industri memerlukan bahan mentah dari sektor pertanian dan pertambangan, hasil sektor industri dibutuhkan oleh sektor pertanian dan jasa-jasa.

Untuk menghasilkan suatu barang atau jasa diperlukan barang lain yang disebut faktor produksi. Total nilai barang dan jasa yang diproduksi di wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu (satu tahun) dihitung sebagai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Cara perhitungan PDRB dapat diperoleh melalui 3 (tiga) pendekatan (BPS, 1997: 2-3) yaitu : pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran, yang selanjutnya dijelaskan sebagai berikut :

a. Pendekatan Produksi

Menurut pendekatan produksi, PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya, dikelompokkan menjadi 9 (sembilan) sektor atau lapangan usaha, yaitu: Pertanian, Pertambangan dan Penggalan, Industri pengolahan, Listrik, Gas dan Air Bersih,

Bangunan, Perdagangan, Hotel dan Restoran, Pengangkutan dan komunikasi, Jasa Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, Jasa-jasa.

b. Pendekatan Pengeluaran

Menurut pendekatan pengeluaran, PDRB adalah penjumlahan semua komponen permintaan akhir, yaitu:

1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung.
2. Konsumsi pemerintah.
3. Pembentukan modal tetap domestik bruto.
4. Perubahan stok.
5. Ekspor netto, dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Ekspor netto adalah ekspor dikurangi impor.

c. Pendekatan Pendapatan

Menurut pendekatan pendapatan, PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi dalam suatu wilayah di dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa rumah, bunga modal dan keuntungan. Semua hitungan tersebut sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak lainnya.

5. Pembangunan Seimbang dan Tidak Seimbang

Kawengian (2002: 7-9), Pembangunan seimbang itu diartikan pula sebagai keseimbangan pembangunan di berbagai sektor, misalnya industri dan sektor pertanian, sektor luar negeri dan sektor domestik, dan antara sektor produktif dan sektor prasarana.

Pembangunan seimbang ini biasanya dilaksanakan dengan maksud untuk menjaga agar proses pembangunan tidak menghadapi hambatan – hambatan dalam :

- a. Memperoleh bahan baku, tenaga ahli, sumber daya energi dan fasilitas-fasilitas untuk mengangkut hasil-hasil produksi ke pasar.
- b. Memperoleh pasar untuk barang-barang yang telah dan akan diproduksi.

Sementara itu analisa Lewis (dalam Arsyad, 1992: 257-259) dalam Kawengian, 2002: 10), menunjukkan bahwa perlunya pembangunan seimbang yang ditekankan pada keuntungan yang akan diperoleh dari adanya saling ketergantungan yang efisien antara berbagai sektor, yaitu antara sektor pertanian dan sektor industri. Menurut Lewis, akan timbul banyak masalah jika usaha pembangunan hanya dipusatkan pada satu sektor saja. Tanpa adanya keseimbangan pembangunan antara berbagai sektor akan menimbulkan adanya ketidakstabilan dan gangguan terhadap kelancaran kegiatan ekonomi sehingga proses pembangunan terhambat.

Lewis, menggunakan gambaran dibawah ini untuk menunjukkan pentingnya upaya pembangunan yang menjamin adanya keseimbangan antara sektor industri dan sektor pertanian. Misalnya di sektor pertanian

terjadi inivasi dalam teknologi produksi bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan domestik, implikasinya yang mungkin timbul adalah :

- a. Terdapat surplus di sektor pertanian yang dapat dijual ke sektor non pertanian.
- b. Produksi tidak bertambah berarti tenaga kerja yang digunakan bertambah sedikit dan jumlah pengangguran tinggi.
- c. Kombinasi dari kedua keadaan tersebut.

Jika saja industri mengalami perkembangan yang pesat, maka sektor-sektor tersebut akan dapat menyerap kelebihan produksi bahan pangan maupun kelebihan tenaga kerja. Tetapi tanpa adanya perkembangan di sektor industri, maka nilai tukar (Term of Trade) sektor pertanian akan memburuk sebagai akibat dari kelebihan produksi tenaga kerja, dan akan menimbulkan akibat yang depresif terhadap pendapatan di sektor pertanian. Oleh sebab itu di sektor pertanian tidak terdapat lagi perangsang untuk mengadakan investasi baru dan melakukan inovasi.

Jika pembangunan ekonomi ditekankan pada industrialisasi dan mengabaikan sektor pertanian juga akan menimbulkan masalah yang pada akhirnya akan menghambat proses pembangunan ekonomi. Masalah kekurangan barang pertanian akan terjadi dan akan mengakibatkan kenaikan barang-barang tersebut.

Jika sektor pertanian tidak berkembang, maka sektor industri juga tidak berkembang, dan keuntungan sektor industri hanya merupakan bagian yang kecil saja dari pendapatan nasional. Oleh karenanya tabungan maupun investasi tingkatnya akan tetap rendah. Berdasarkan pada masalah-masalah yang mungkin akan timbul jika pembangunan hanya ditekankan pada salah satu sektor pertanian saja, maka Lewis menyimpulkan bahwa pembangunan haruslah dilakukan secara bersamaan di kedua sektor tersebut.

Hirschman dan Streeten (dalam Arsyad, 1992:262-70) dalam Kawengian 2002: 10) mengemukakan teori pembangunan tidak seimbang adalah pola pembangunan yang lebih cocok untuk mempercepat proses pembangunan di negara sedang berkembang. Pola pembangunan tidak seimbang ini, menurut Hirschman, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Secara historis pembangunan ekonomi yang terjadi coraknya tidak seimbang.
- b. Untuk mempertinggi efisiensi penggunaan sumber-sumber daya yang tersedia.
- c. Pembangunan tidak seimbang akan menimbulkan kemacetan atau gangguan-gangguan dalam proses pembangunan yang akan menjadi pendorong bagi pembangunan selanjutnya.

6. Investasi

Kawengian (2002: 10-12), Keberhasilan pertumbuhan PDRB, tidak dapat dipisahkan dari meningkatnya investasi. Investasi adalah kata kunci penentu laju pertumbuhan ekonomi, karena disamping akan mendorong kenaikan output secara signifikan, juga secara otomatis akan meningkatkan permintaan input, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat sebagai konsekuensi dari meningkatnya pendapatan yang diterima masyarakat.

Investasi adalah mobilisasi sumber daya untuk menciptakan atau menambah kapasitas produksi/pendapatan di masa yang akan datang. Dalam investasi ada 2 (dua) tujuan utama yaitu mengganti bagian dari penyediaan modal yang rusak dan tambahan penyediaan modal yang ada. Gambaran perkembangan pembangunan daerah secara makro sektoral tidak lepas dari perkembangan distribusi dan alokasi investasi antar daerah. Dalam kaitan itu perlu dipisahkan jenis investasi yang dilakukan oleh sektor swasta dan pemerintah, mengingat faktor yang menentukan lokasi kedua jenis investasi tersebut tidak selalu sama. Umumnya pemerintah masih harus memperhatikan beberapa faktor, seperti pengembangan suatu daerah tertentu karena alasan politis dan strategis, misalnya daerah perbatasan dan daerah yang mempunyai sejarah serta ciri khusus, sehingga memerlukan perhatian yang khusus pula.

Usaha pemerataan pembangunan antar daerah juga merupakan faktor lain yang diperhitungkan pemerintah. Pihak swasta tidak berurusan secara khusus dengan faktor-faktor tersebut. Kalaupun ada

keterkaitannya, sifatnya tidak langsung, yaitu melalui berbagai peraturan (Azis, 1985: 15) dalam Kawengian 2002: 12).

Dengan demikian pembangunan tidak seimbang akan mempercepat pembangunan ekonomi pada masa yang akan datang. Persoalan pokok yang dianalisis Hirschman dalam teori pembangunan tidak seimbang adalah bagaimana untuk menentukan proyek yang harus didahulukan pembangunannya, dimana proyek-proyek tersebut memerlukan modal dan sumber daya yang tersedia, agar penggunaan berbagai sumber daya yang tersedia tersebut bisa menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang maksimal.

Cara pengalokasian sumber daya tersebut dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu cara pilihan pengganti (Substitution Choice) dan cara pilihan penundaan (Postponment Choice). Cara yang pertama merupakan suatu cara pemilihan proyek yang bertujuan untuk menentukan apakah proyek A atau proyek B yang harus dilaksanakan. Sedangkan cara yang kedua merupakan suatu cara pemilihan yang menentukan urutan proyek yang akan dilaksanakan yaitu menentukan apakah proyek A atau proyek B yang harus didahulukan.

Berdasarkan prinsip pemilihan proyek di atas, Hirschman menganalisis masalah alokasi sumber daya antara sektor prasarana atau Social Overhead Capital (SOC) dengan sektor produktif yang langsung menghasilkan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat atau Directly Productive Activities (DPA).

Ada 3 (tiga) cara pendekatan yang mungkin dilakukan dalam mengembangkan sektor prasarana dan sektor produktif, yaitu:

- a. Pembangunan seimbang antara kedua sektor tersebut.
- b. Pembangunan tidak seimbang, dimana pembangunan sektor prasarana lebih ditekankan, dan
- c. Pembangunan tidak seimbang, dimana sektor produktif lebih ditekankan.

Kegiatan ekonomi akan mencapai efisiensi yang optimal jika :

- 1) Sumber-sumber daya dialokasikan antara sektor DPA dan sektor SOC sedemikian rupa sehingga dengan sumber daya sejumlah tertentu bisa dicapai tingkat produksi yang maksimum.
- 2) Untuk suatu tingkat produksi tertentu, jumlah seluruh sumber daya yang digunakan di sektor DPA dan sektor SOC jumlahnya minimum.

Di kebanyakan negara sedang berkembang, program pembangunan sering lebih ditekankan pada pembangunan prasarana untuk mempercepat pembangunan sektor produktif.

7. Hubungan antara Variabel

Pengaruh efisiensi manajemen keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah adalah bahwa pendapatan daerah dan pengeluaran daerah yang signifikan dan positif berarti manajemen keuangan daerah tersebut terjadi efisiensi .

Adapun kriteria penilaian kinerja efisiensi dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.1. Tabel Kriteria Kinerja Keuangan

Prosentase Kinerja Keuangan	Kriteria
(1)	(2)
100 % keatas	Tidak efisien
90 % - 100 %	Kurang efisien
80 % - 90 %	Cukup efisien
60 % - 80 %	Efisien
dibawah dari 60 %	Sangat efisien

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996, tentang
Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan (H. Darsil, 2004: 49).

Pengaruh efektivitas manajemen keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah bahwa efektivitas manajemen keuangan daerah yang positif dan signifikan berarti target APBD dan realisasi APBD akan meningkat sehingga berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Adapun nilai efektivitas perbandingannya diukur dengan kriteria penilaian kinerja anggaran dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.2. Tabel Kriteria Kinerja Keuangan

Prosentase Kinerja Keuangan	Kriteria
(1)	(2)
diatas 100 %	Sangat efektif
90 % - 100 %	Efektif
80 % - 90 %	Cukup efektif
60 % - 80 %	Kurang efektif
kurang dari 60 %	Tidak efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996, tentang
Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan (H. Darsil, 2004: 49).

Hasil Penelitian Terdahulu

Imron Rosyadi (2000), melakukan kajian terhadap hubungan antara Pengeluaran Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Jambi selama periode 1979-1998. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi yang

diestimasi dengan metode *Ordinary Least Square (OLS)* dan menerapkan model kausalitas koreksi kesalahan (ECM). Analisis dilakukan terhadap data sekunder berupa PDRB Kota Jambi berdasarkan harga konstan (tanpa migas) dan Pengeluaran Pembangunan Kota Jambi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama periode penelitian terdapat pola hubungan satu arah antara pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pembangunan. Dalam jangka pendek pengeluaran pembangunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam jangka panjang pengeluaran pembangunan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Supratman (2001), meneliti tentang Efisiensi dan Efektivitas Sistem Pengelolaan Keuangan Di Propinsi DKI Jakarta. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan di Pemda DKI Jakarta tergolong efisien, sedangkan tingkat efektivitas dari pengelolaan keuangan pemerintah daerah berkisar antara 92 persen sampai dengan 135 persen. Dengan rata-rata selama tahun penelitian sebesar 112 persen hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta sangat efektif. Tingkat koefisien korelasi (r) menunjukkan bahwa keeratan hubungan kedua variabel yaitu penerimaan dan pengeluaran rutin tersebut adalah 0,931 atau 93,1 persen dan koefisien determinasinya (r^2) sebesar 86,7 persen dan memiliki hubungan yang searah atau bernilai positif.

Mulyanto (1999), Penelitian studi tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, 1966-1995 (Pendekatan Teori Pertumbuhan Baru dengan Teknik Ekonometrika Modern). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan uji stasioneritas

data/variabel makro perekonomian di Indonesia yang stasioner pada orde 0 (nol) adalah variabel-variabel dalam bentuk pertumbuhan, sedang variabel yang lainnya belum atau tidak stasioner/stabil. Dengan uji kointegrasi dapat disimpulkan bahwa kelompok variabel Kerangka ekonomi dan kelembagaan mempunyai pengaruh yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Demikian pula untuk variabel TOT (Indeks Nilai Tukar Ekspor dan Impor) dan variabel DUM (variabel Dummy dari Strategi Kebijakan Perdagangan). Variabel DUM yang bernilai 1 untuk periode sebelum tahun 1986 (strategi substitusi impor), dan bernilai 0 untuk tahun 1986 dan sesudahnya (strategi promosi ekspor) menghasilkan parameter yang negatif. Bahwa pelaksanaan strategi substitusi impor di Indonesia tidak menguntungkan bagi pencapaian pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan. Sedang dampak TOT yang juga negatif mencerminkan bahwa mahalanya harga produk ekspor dari Indonesia (daya saing rendah) tidak efektif bagi pencapaian pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Sedangkan dari hasil analisis model koreksi kesalahan (ECM) dapat disimpulkan bahwa kelompok variabel Kerangka Ekonomi dan Kelembagaan, kecuali variabel IYDB {Inflasi yang diukur dari indeks deflator YDP (Pendapatan Domestik Bruto)} semuanya mempunyai pengaruh yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang. Sementara variabel TOT yang dalam uji kointegrasi mempunyai dampak negatif, dari hasil simulasi ECM menunjukkan pengaruh yang positif.

Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini yang diteliti pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dibatasi pada tingkat efisiensi manajemen keuangan daerah dan tingkat efektivitas manajemen keuangan daerah. Dimana efisiensi manajemen keuangan daerah dan efektivitas manajemen keuangan daerah dimasukan sebagai variabel independen dan pertumbuhan ekonomi daerah sebagai variabel dependen-nya , sedangkan faktor waktu (masa sebelum krisis ekonomi dan masa sesudah krisis ekonomi) sebagai variabel moderator / Dummy.

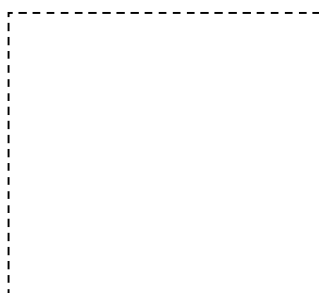
Efektivitas manajemen keuangan daerah dan efisiensi manajemen keuangan daerah diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Hubungan dalam penelitian ini adalah bahwa efektivitas manajemen keuangan daerah dan efisiensi manajemen keuangan daerah berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi daerah, sedangkan masa krisis ekonomi berpengaruh dalam efektivitas manajemen keuangan daerah dan efisiensi manajemen keuangan daerah kepada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Kemampuan pelaksanaan manajemen keuangan daerah menunjukan kinerja ekonomi daerah yang signifikan dan positif atau tingginya pertumbuhan ekonomi daerah yang menjadi tolak ukur tingkat keberhasilan suatu daerah.

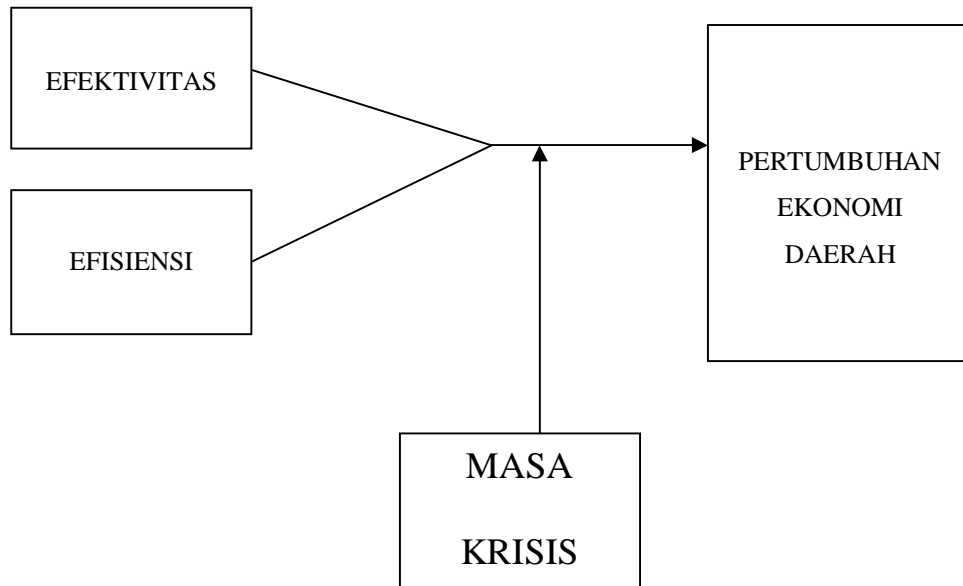
Manajemen Keuangan Daerah

Kinerja Ekonomi Daerah



xlix





Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran

Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan kajian dan manfaat kajian maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Variabel efektivitas manajemen keuangan daerah diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Karanganyar selama periode penelitian.

2. Variabel efisiensi manajemen keuangan daerah diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Karanganyar selama periode penelitian.
3. Masa krisis ekonomi sangat berperan secara signifikan dalam studi pengaruh variabel efektivitas dan variabel efisiensi manajemen keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten Karanganyar dimana pengaruh efektivitas dan efisiensi terhadap pertumbuhan ekonomi diduga lebih tinggi pada masa sebelum krisis ekonomi terjadi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kausal, dimana penelitian ini digunakan untuk menganalisis pengaruh efektivitas dan efisiensi manajemen keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Karanganyar.

B. Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah organisasi yaitu Kabupaten Karanganyar selama periode 1990 – 2005 / (sebelum dan sesudah masa krisis ekonomi).

C. Jenis, sumber dan metode pengumpulan data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series tahun 1990 – 2005. Data penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari beberapa sumber :

- a. Data Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan, diperoleh dari Pendapatan Regional Kabupaten Karanganyar (BPS), Potensi Daerah Kabupaten Karanganyar (Bappeda).
- b. Data Realisasi APBD dan Target APBD, diperoleh dari Indikator Ekonomi Kabupaten Karanganyar (BPS), Kabupaten Karanganyar Dalam Angka (BPS).

- c. Data Pengeluaran Belanja Daerah dan Pendapatan Daerah, diperoleh dari Kabupaten Karanganyar Dalam Angka (BPS), Indikator Ekonomi Kabupaten Karanganyar (BPS).

Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan metode pengumpulan data, antara lain :

- a. Studi perpustakaan yaitu dengan mengumpulkan data-data di Kabupaten Karanganyar.
- b. Observasi dan Wawancara langsung yaitu dengan melakukan kunjungan kepada nara sumber penelitian.

D. Metode dan Teknik Analisis Data

Sebelum melakukan analisis pengaruh variabel satu dengan yang lain terlebih dahulu dilakukan pengukuran terhadap beberapa variabel tertentu yaitu :

- a. Metode Analisis :

Studi Supratman, (2001) Membahas Efisiensi dan Efektivitas Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Di Propinsi DKI Jakarta, untuk mengetahui tingkat pertumbuhan realisasi penerimaan dan pengeluaran rutin daerah dapat digunakan formula (Widodo, 1990: 36)

$$\Delta X = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100 \% \dots\dots\dots (3.1)$$

Dimana :

- X = Rasio pertumbuhan realisasi penerimaan atau pengeluaran rutin
- X_t = Jumlah penerimaan atau jumlah pengeluaran rutin

$X_{(t-1)}$ = Jumlah penerimaan atau pengeluaran rutin tahun sebelumnya.

Sedangkan analisis yang digunakan terhadap pengelolaan keuangan daerah dengan pengeluaran rutin menggunakan ukuran tingkat efisiensi yaitu perbandingan antara realisasi pengeluaran anggaran rutin dengan pendapatan / penerimaan daerah dikalikan dengan seratus dalam bentuk persentase.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Pengeluaran Rutin}}{\text{Penerimaan}} \times 100 \% \dots\dots\dots (3.2)$$

Analisis efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat dirumuskan dengan menggunakan rasio perbandingan antara realisasi penerimaan dengan target yang ditetapkan dikalikan dengan seratus dalam bentuk persentase.

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target}} \times 100 \% \dots\dots\dots (3.3)$$

Model Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Variabel Terikat : Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Y)
2. Variabel Bebas : a. Efektivitas Manajemen Keuangan Daerah (X1)
b. Efisiensi Manajemen Keuangan Daerah (X2)
3. Variabel Moderator / Dummy : Masa Krisis Ekonomi (D)

Model analisis yang digunakan adalah model persamaan regresi linier berganda (Multiple Liniear Regression Model) yang dapat di formulasi sebagai berikut :

Model 1 : $Y_t = a_0 + a_1X_{1t} + e_{1t}$
(3.4)

Model 1 adalah model analisis yang tidak mempertimbangkan efek masa krisis ekonomi.

Model 2 : $Y_t = b_0 + b_2X_{2t} + e_{2t}$
(3.5)

Model 2 adalah model analisis yang tidak mempertimbangkan efek masa krisis ekonomi.

Model 3 : $Y_t = c_0 + c_1X_{1t} + c_2X_{2t} + c_3D + e_{3t}$
(3.6)

Model 3 adalah model analisis dengan mempertimbangkan efek masa krisis ekonomi.

b. Definisi operasional dan pengukuran variabel penelitian :

Variabel Penelitian	Notasi	Status Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran	Skala Data
1. Pertumbuhan ekonomi daerah	Y	DV	Peningkatan PDRB Kabupaten dari tahun/periode ke tahun/periode tahun $= \frac{PDRB_{t_{n+1}} - PDRB_t}{PDRB_t} \times 100 \%$ (Widodo, 2004) Besarnya rasio relisasi APBD	Persen (%) / tahun / periode tahun	Interval

2. Efektivitas manajemen keuangan daerah	X1	IV	<p>terhadap target APBD</p> $= \frac{\text{Realisasi APBD}}{\text{Target APBD}} \times 100 \%$ <p>(H. Darsil, 2004)</p>	Persen (%) / tahun / periode tahun	Interval
3. Efisiensi manajemen keuangan daerah	X2	IV	<p>Besarnya rasio pengeluaran belanja daerah terhadap pendapatan daerah</p> $= \frac{\text{Pengeluaran}}{\text{Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$ <p>(H. Darsil, 2004)</p>	Persen (%) / tahun / periode tahun	Interval
4. Masa krisis ekonomi	D	Dummy	<p>Pembedaan masa sebelum dan sesudah krisis ekonomi</p>	<p>D = 0, jika sebelum krisis ekonomi (1990-1997)</p> <p>D = 1, jika sesudah krisis ekonomi (1998-2005)</p>	Nominal / Kategorik

Keterangan :

DV = Dependent Variabel

IV = Independent Variabel.

c. Uji Signifikansi :

Uji t dilakukan untuk mengetahui signifikan tidaknya suatu variabel penjelas dalam mempengaruhi variabel tak bebas.

$$t = \frac{b_i - b_i^*}{Se(b_i)} \dots\dots\dots (3.7)$$

Dimana, b_i parameter yang diestimasi, b_i^* nilai hipotesis dari b_i ($H_0: b_i = b_i^*$) dan $Se(b_i)$ adalah simpangan baku b_i Hipotesis: $H_0: b_i = 0$ dan $H_a: b_i \neq 0$

Uji t digunakan untuk melihat signifikansi dari variabel bebas dengan menganggap variabel lainnya konstan. Jika t yang dihitung dari masing-masing variabel nyata (signifikan), yaitu melebihi nilai kritis t maka mempunyai makna secara statistik. Sebaliknya jika nilai t lebih kecil dari t tabel maka hubungan variabel itu tidak nyata atau tidak berarti secara statistik.

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel penjelas secara keseluruhan signifikan secara statistik dalam mempengaruhi variabel tidak bebas

$$F = \frac{R^2 / (k - 1)}{(1 - R^2) / (n - k)} \dots\dots\dots$$

(3.8)

Dimana, k adalah jumlah parameter yang diestimasi termasuk konstanta dan n adalah jumlah pengamatan

Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh dari variabel-variabel bebas secara keseluruhan terhadap variabel tak bebas. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai F-hitung dan nilai F-tabel, dimana bila $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$, maka H_0 ditolak sedangkan H_a diterima, dan sebaliknya. Ini berarti bahwa variabel bebas secara nyata mempengaruhi variabel tak bebas.

Uji R^2 dilakukan dengan melihat koefisien determinasi, gunanya untuk menghitung persentase total dari variasi bebas, yaitu seberapa besar variabel bebas menjelaskan variabel tak bebas. Nilai R^2 terletak antara 0 sampai 1. Semakin besar R^2 menunjukkan estimasi akan mendekati kenyataan yang sebenarnya.

BAB IV

ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Kabupaten Karanganyar

Kabupaten Karanganyar merupakan bagian dari eks-Karisidenan Surakarta atau yang sekarang lebih dikenal sebagai kawasan pembangunan SUBOSUKOWONOSRATEN. Nama ini merupakan istilah singkatan dari satu kota dan enam kabupaten yaitu Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Klaten. Berikut gambaran singkat tentang Kabupaten Karanganyar.

1. Keadaan Geografis

Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu kabupaten di propinsi Jawa Tengah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Sragen di sebelah utara, Propinsi Jawa Timur di sebelah timur, Kabupaten Wonogiri dan Sukoharjo di sebelah selatan serta Kota Surakarta dan Kabupaten Boyolali disebelah barat. Bila dilihat dari garis bujur dan garis lintang, maka Kabupaten Karanganyar terletak antara $110^{\circ}40''$ – $110^{\circ}70''$ bujur timur dan $7^{\circ}28''$ – $7^{\circ}46''$ lintang selatan, dengan ketinggian rata-rata 511 meter diatas permukaan laut yang beriklim tropis dengan temperatur 22° – 31° celcius dengan wilayah 77.378,6374 Ha.

Berdasarkan pembagian wilayah administrasi, Kabupaten Karanganyar terdiri dari 17 kecamatan yang meliputi 15 kelurahan dan 162 desa. Desa/kalurahan tersebut terdiri dari 1.091 dusun, 2.313 dukuh, 1.835 RW dan 6.020 RT. Klasifikasi ⁴⁵ pada tahun 2004 terdiri dari 14 desa/kalurahan swadaya, 125 desa/kalurahan swakarya dan 38 desa/kalurahan swasembada.

2. Kependudukan

Jumlah penduduk di Kabupaten Karanganyar berdasarkan registrasi tahun 2004 sebanyak 830.640 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 410.985 jiwa dan perempuan 419.655 jiwa dibandingkan tahun sebelumnya terdapat pertumbuhan penduduk sebanyak 7.437 jiwa atau laju pertumbuhan penduduk mengalami pertumbuhan sebesar 0.90% dengan kepadatan penduduk mencapai 1.073 jiwa/km.

Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Kabupaten Karanganyar Menurut Jenis Kelamin Dan Kecamatan Tahun 2005.

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Total	Prosentase
		Laki-laki	Perempuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jatipuro	18.840	18.821	37.661	4.48
2	Jatioso	20.280	19.866	40.146	4.77
3	Jumapolo	23.274	23.179	46.453	5.52
4	Jumantono	23.551	24.001	47.552	5.66
5	Matesih	22.394	22.515	44.909	5.34
6	Tawangmangu	21.894	22.711	44.605	5.31
7	Ngargoyoso	17.212	17.533	34.745	4.13
8	Karangpandan	20.564	21.302	41.866	4.98
9	Karanganyar	35.187	37.563	72.750	8.65
10	Tasikmadu	27.161	27.537	54.698	6.51
11	Jaten	33.784	34.744	68.528	8.15
12	Colomadu	28.673	29.225	57.898	6.89
13	Gondangrejo	32.062	32.488	64.550	7.68
14	Kebakkramat	28.506	28.974	57.480	6.84
15	Mojogedang	31.355	31.541	62.896	9.86

16	Kerjo	17.959	18.858	36.817	4.38
17	Jenawi	13.412	13.721	27.133	3.23
	Jumlah	416.108	424.579	840.687	100

Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar 2005

Jumlah penduduk terbesar terdapat di kecamatan karanganyar yaitu sebesar 72.112 jiwa, selanjutnya diikuti kecamatan Jaten dan kecamatan Mojogedang diperingkat kedua dan ketiga. Sedangkan jumlah penduduk terkecil terdapat di kecamatan Jenawi yaitu sebesar 27.000 jiwa.

Tabel 4.2. Luas Wilayah, Distribusi Kepadatan dan Pertumbuhan Dirinci Menurut Kecamatan Di Kabupaten Karanganyar Tahun 2004.

No	Kecamatan	Luas Wilayah	Distribusi Penduduk	Kepadatan Penduduk	Pertumbuhan Penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jatipuro	40,36	4,52	9,30	0,34
2	Jatioso	67,16	4,8	594	0,59
3	Jumapolo	55,67	5,57	831	0,56
4	Jumantono	53,55	5,7	884	0,79
5	Matesih	26,27	5,35	1.693	0,25
6	Tawangamngu	70,03	5,34	634	0,57
7	Ngargoyoso	65,34	4,15	528	0,55
8	Karangpandan	34,11	5	1.218	1,31
9	Karanganyar	43,03	8,68	1.376	0,91
10	Tasikmadu	27,6	6,54	1.967	0,85
11	Jaten	25,5	8,2	2.665	1,38
12	Colomadu	15,64	6,48	3.440	2,66
13	Gondangrejo	58,6	7,65	1.119	0,47
14	Kebakkramat	36,46	6,86	1.562	1,15

15	Mojogedang	53,31	7,49	1.168	1,18
16	Kerjo	46,82	4,41	783	0,35
17	Jenawi	56,08	3,25	481	0,47

Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar 2005

3. Pertumbuhan Ekonomi

Secara umum kondisi perekonomian Kabupaten Karanganyar pada lima tahun terakhir masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi propinsi Jawa Tengah, baik laju pertumbuhan ekonomi atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Selama lima tahun terakhir (2000-2004) laju pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan yang positif.

Tabel 4.3. PDRB Atas Harga Konstan Tahun 1983 dan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Karanganyar Tahun 1990 – 2005

TAHUN	Atas Dasar Harga Konstan	
	PDRB (Rp)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
(1)	(2)	(3)
1990	469.424,46	19,38
1991	580.087,13	18,52
1992	839.872,53	44,78
1993	892.104,44	6,22
1994	1.047.286,13	17,39
1995	1.120.785,44	7,02
1996	1.210.112,30	7,97
1997	1.255.719,21	3,77
1998	1.109.425,03	(- 11,65)
1999	1.141.544,82	2,89
2000	1.193.085,08	4,51

2001	1.210.084,63	1,42
2002	1.248.686,47	3,19
2003	1.290.163,05	3,32
2004	1.342.109,36	4,03
2005	1.475.029,10	9,9

Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar, 2005

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar mengalami pertumbuhan yang positif. Laju pertumbuhan PDRB tertinggi berdasarkan harga berlaku terjadi pada tahun 2002 yang mencapai 12,41%. Sedangkan berdasarkan harga konstan yaitu sebesar 4,51% pada tahun 2000. angka ini mampu melampaui laju pertumbuhan ekonomi provinsi Jawa Tengah yang hanya 3,93 %.

B. Deskripsi Variabel Penelitian

1. Efektivitas Manajemen Keuangan Daerah

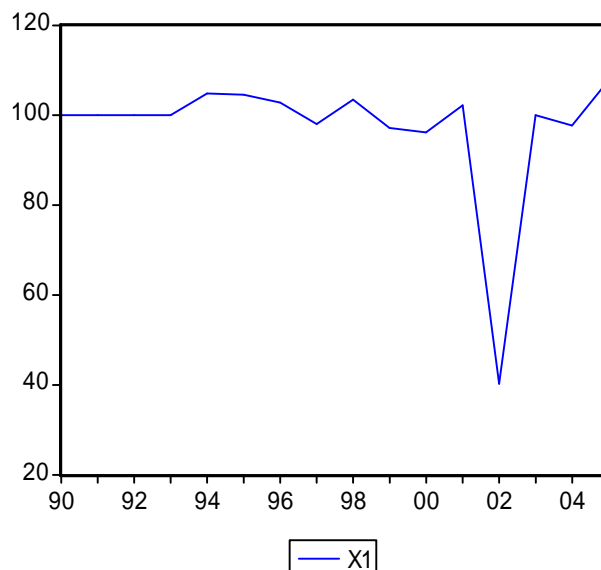
a. Secara Umum

Efektivitas manajemen keuangan daerah di Kabupaten Karanganyar selama penelitian, secara umum yaitu rasio perbandingan antara realisasi pendapatan daerah dan target pendapatan daerah berdasarkan kriteria kinerja keuangan adalah prosentase kinerja keuangan 90% - 100% dengan kriteria efektif.

b. Sebelum krisis ekonomi dan setelah krisis ekonomi

Sebelum krisis ekonomi efektivitas manajemen keuangan daerah di Kabupaten Karanganyar berdasarkan kriteria kinerja keuangan yaitu rasio perbandingan antara realisasi pendapatan daerah dan target pendapatan daerah adalah pada tahun 1990 sampai dengan tahun 1993

prosentase kinerja keuangan yaitu 100% dengan kriteria efektif, pada tahun 1994 yaitu 104,8571%, tahun 1995 yaitu 104,5475, tahun 1996 yaitu 102,8265% dengan kriteria sangat efektif, tahun 1997 yaitu 98,0594% dengan kriteria efektif. Setelah krisis ekonomi efektivitas manajemen keuangan daerah berdasarkan prosentase kinerja keuangan adalah tahun 1998 yaitu 103,4458% dengan kriteria sangat efektif, tahun 1999 yaitu 97,1907% dengan kriteria efektif, tahun 2000 yaitu 96,1995% dengan kriteria efektif, tahun 2001 yaitu 102,2353% dengan kriteria sangat efektif, tahun 2002 yaitu 40,2717% dengan kriteria tidak efektif, tahun 2003 yaitu 100,0019% dengan kriteria efektif, tahun 2004 yaitu 97,7020% dengan kriteria efektif, tahun 2005 yaitu 107,7635% dengan kriteria sangat efektif.



Gambar 4.1 Grafik Efektivitas

2. Efisiensi Manajemen Keuangan Daerah

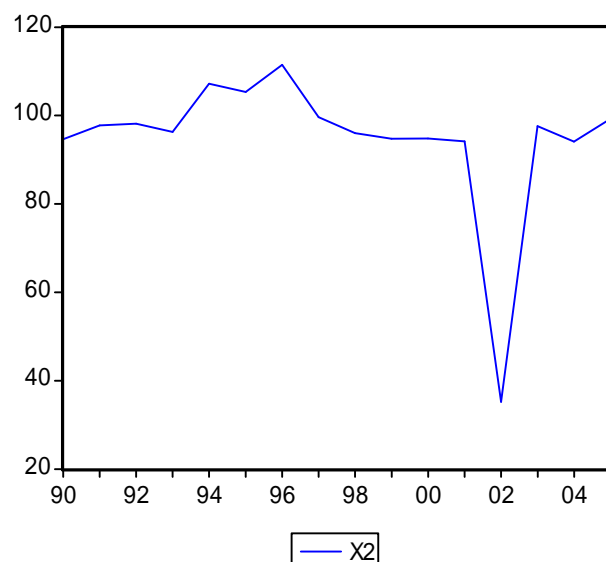
a. Secara Umum

Efisiensi manajemen keuangan daerah di Kabupaten Karanganyar selama penelitian secara umum yaitu rasio perbandingan antara pengeluaran daerah dengan pendapatan daerah berdasarkan kriteria kinerja keuangan adalah 90% -100% dengan kriteria kurang efisien.

b. Sebelum krisis ekonomi dan sesudah krisis ekonomi

Efisiensi manajemen keuangan daerah di Kabupaten Karanganyar sebelum krisis ekonomi yaitu berdasarkan kriteria kinerja keuangan rasio perbandingan antara pengeluaran daerah dengan pendapatan daerah adalah pada tahun 1990 yaitu 94,6355% dengan kriteria kurang efisien, tahun 1991 yaitu 97,7929% dengan kriteria kurang efisien, tahun 1992 yaitu 98,1624% dengan kriteria kurang efisien, tahun 1993 yaitu 96,3088% dengan kriteria kurang efisien, tahun 1994 yaitu 107,1964% dengan kriteria tidak efisien, tahun 1995 yaitu 105,3087% dengan kriteria tidak efisien, tahun 1996 yaitu 111,4749% dengan kriteria tidak efisien, tahun 1997 yaitu 99,6137% dengan kriteria kurang efisien. Sesudah krisis ekonomi variabel manajemen keuangan daerah berdasarkan prosentase kinerja keuangan adalah tahun 1998 yaitu 96,0203% dengan kriteria kurang efisien, tahun 1999 yaitu 94,7727% dengan kriteria kurang efisien, tahun 2000 yaitu 94,8282% dengan kriteria kurang efisien, tahun 2001 yaitu 94,1720% dengan kriteria kurang efisien, tahun 2002 yaitu 35,2190 dengan kriteria sangat efisien, tahun 2003 yaitu 97,6027%

dengan kriteria kurang efisien, tahun 2004 yaitu 94,1190% dengan kriteria kurang efisien tahun 2005 yaitu 99,2612 dengan kriteria kurang efisien.



Gambar 4.2 Grafik Efisiensi

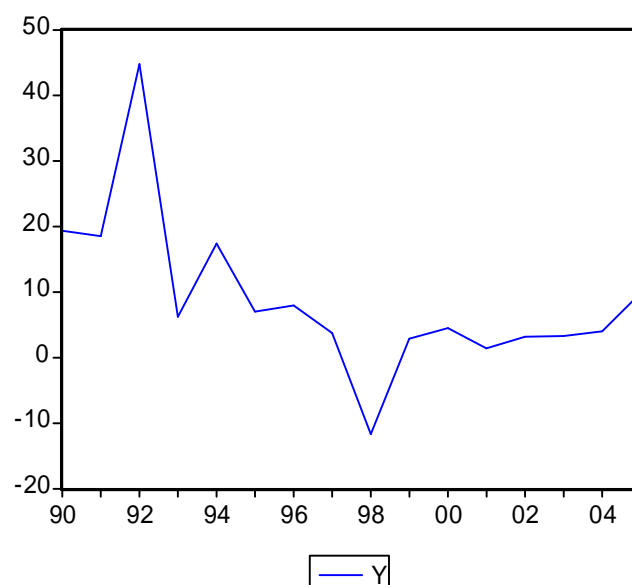
3. Pertumbuhan Ekonomi

a. Secara umum

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa secara umum pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karanganyar pada tahun 1990 sampai dengan 2005 mengalami peningkatan setiap tahunnya, kondisi ini menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karanganyar pada tahun penelitian mampu berkontribusi positif dalam upaya peningkatan kesempatan kerja, kesejahteraan masyarakat dan meningkatnya pendapatan yang diterima masyarakat.

b. Sebelum krisis ekonomi dan sesudah krisis ekonomi

Dilihat dari sebelum krisis ekonomi yaitu tahun 1990 sampai dengan 1997 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karanganyar relatif meningkat setiap tahunnya. Sesudah krisis ekonomi yaitu tahun 1998 sampai dengan tahun 2005 selama penelitian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar mengalami penurunan, namun demikian selama kurun waktu 5 tahun (2001-2005) laju pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan positif. Hal ini merupakan salah satu tolok ukur bahwa kinerja pembangunan di bidang perekonomian di Kabupaten Karanganyar semakin membaik.



Gambar 4.3 Grafik Pertumbuhan Ekonomi

Analisa data dalam penelitian ini, membahas pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar, variabel efektivitas manajemen keuangan daerah, variabel efisiensi manajemen keuangan daerah, variabel Dummy.

Model analisis yang digunakan adalah model persamaan regresi linier berganda (*Multiple Linier Regression Model*) yang tidak mempertimbangkan efek masa krisis ekonomi dan dengan mempertimbangkan masa krisis ekonomi.

Tabel 4.4. Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Konstan dan Hasil Perhitungan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 1990 s/d 2005 dengan dasar tahun 1983.

TAHUN	Atas Dasar Harga Konstan	
	PDRB (Rp)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
(1)	(2)	(3)
1990	469.424,46	19,38
1991	580.087,13	18,52

1992	839.872,53	44,78
1993	892.104,44	6,22
1994	1.047.286,13	17,39
1995	1.120.785,44	7,02
1996	1.210.112,30	7,97
1997	1.255.719,21	3,77
1998	1.109.425,03	(- 11,65)
1999	1.141.544,82	2,89
2000	1.193.085,08	4,51
2001	1.210.084,63	1,42
2002	1.248.686,47	3,19
2003	1.290.163,05	3,32
2004	1.342.109,36	4,03
2005	1.475.029,10	9,9

Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar

Pertumbuhan ekonomi untuk tahun 1990 sebesar 19,38%, tahun 1991 sebesar 23,57%, tahun 1992 44,78% yang meningkat setiap tahunnya disebabkan karena industri baik besar maupun menengah melaksanakan kegiatan produksinya yang memberikan output untuk pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pada tahun 1993 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan sebesar 6,22% disebabkan kegiatan industri mengurangi produksinya disebabkan permintaan produksi berkurang. Pada tahun 1994 pertumbuhan ekonomi sebesar 17,39% yang mengalami peningkatan dikarenakan kegiatan industri baik besar maupun menengah permintaan untuk produksi meningkat. Kemudian pada tahun 1997 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar mengalami penurunan yaitu 3,77% disebabkan modal untuk melaksanakan kegiatan produksi mengalami penurunan dan permintaan hasil produksi juga mengalami

penurunan. Pada tahun 1998 pertumbuhan ekonomi (-11,65%), tahun 1999 pertumbuhan ekonomi 2,89%, tahun 2000 pertumbuhan ekonomi 4,51%, tahun 2001 pertumbuhan ekonomi 1,42%, tahun 2002 pertumbuhan ekonomi 3,19% tahun 2003 pertumbuhan ekonomi 3,32% yang mengalami penurunan disebabkan karena dampak krisis ekonomi sehingga kegiatan industri mengurangi kegiatan produksinya karena biaya untuk kegiatan produksi meningkat. Tahun 2004 pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan yaitu 4,03% kegiatan industri meningkatkan produksinya, tahun 2005 pertumbuhan ekonomi yaitu 9,9% mengalami kenaikan disebabkan kegiatan industri melaksanakan produksi.

Tabel 4.5. Data Pendapatan Daerah dan Pengeluaran Belanja Daerah

Tahun	Pendapatan Daerah (Rp.)	Pengeluaran (Rp.)	Efisiensi (%)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1990	1.430.584,00	10.817.391,00	94,6355	Kurang efisien
1991	13.232.772,00	12.940.724,00	97,7929	Kurang efisien
1992	16.826.363,00	16.517.169,00	98,1624	Kurang efisien
1993	18.737.633,00	18.046.001,00	96,3088	Kurang efisien
1994	21.818.242,00	23.388.378,00	107,1964	Tidak efisien
1995	27.980.706,00	29.466.124,30	105,3087	Tidak efisien
1996	31.261.513,00	34.848.742,80	111,4749	Tidak efisien
1997	38.565.358,26	38.416.358,68	99,6137	Kurang efisien
1998	46.766.181,12	64.109.102,00	96,0203	Kurang efisien
1999	50.323.040,50	85.601.664,36	94,7727	Kurang efisien
2000	53.832.297,42	79.496.741,90	94,8282	Kurang efisien
2001	253.490.644,73	238.712.245,18	94,1720	Kurang efisien
2002	253.490.644,73	89.277.017,20	35,2190	Sangat efisien
2003	357.223.479,55	348.659.939,79	97,6027	Kurang efisien
2004	353.132.453,10	351.188.875,87	94,1190	Kurang efisien
2005	351.630.897,62	388.737.613,20	99,2612	Kurang efisien

i

siensi Manajemen Keuangan Daerah

Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar

Pendapatan daerah pada tahun 1990 yaitu Rp. 11.430.584,00 dan pengeluaran yaitu Rp. 10.817.391,00, tahun 1991 pendapatan daerah Rp. 13.232.772,00 dan pengeluaran daerah Rp. 12.940.724,00, tahun 1992 pendapatan daerah Rp. 16.826.363,00 dan pengeluaran daerah Rp. 16.517.169,00, tahun 1993 pendapatan daerah Rp. 18.737.633,00, dan pengeluaran daerah Rp. 18.046.001,00 data tersebut diatas dalam perhitungan variabel efisiensi manajemen keuangan daerah adalah kurang efisien disebabkan karena rasio antara pengeluaran daerah dan pendapatan daerah adalah kurang efisien hal ini disebabkan realisasi antara pendapatan daerah dan pengeluaran seimbang.

Kemudian pada tahun 1994 pendapatan daerah Rp. 21.818.242,00 dan pengeluaran daerah Rp. 23.388.378,00, pada tahun 1995 pendapatan daerah Rp. 27.980.706,00 dan pengeluaran Rp.29.466.124,30 tahun 1996 pendapatan daerah Rp.31.261.563,00 pengeluaran Rp. 29.466.124,30

menurut perhitungan rasio variabel efisiensi adalah tidak efisien disebabkan karena hasil yang diperoleh lebih besar dari 100% yaitu realisasi pengeluaran lebih besar dari pendapatan daerah.

Pada tahun 1997 pendapatan daerah Rp. 38.565.358,26 dan pengeluaran daerah Rp.38.416.358,68 tahun 1998 pendapatan daerah Rp.66.766.181,12 dan pengeluaran Rp. 64.109.102,00 tahun 1999 pendapatan daerah Rp. 90.323.040,50 dan pengeluaran daerah Rp. 85.601.664,36 tahun 2000 pendapatan daerah Rp. 83.832.297,42 dan pengeluaran daerah Rp. 79.496.741,90 tahun 2001 pendapatan daerah Rp. 253.490.644,73 dan pengeluaran daerah Rp. 238.712.245,18 dari hasil rasio perhitungan variabel efisiensi adalah kurang efisien disebabkan realisasi pengeluaran seimbang dengan pendapatan daerah.

Pada tahun 2002 pendapatan daerah Rp. 253.490.644,73 dan pengeluaran Rp. 89.277.017,20 dari perhitungan rasio variabel efisiensi adalah sangat efisien yaitu kurang dari 60% disebabkan rasio pendapatan daerah lebih besar realisasi untuk pengeluaran lebih sedikit hal ini disebabkan tujuan dari program pembangunan di Kabupaten Karanganyar tercapai pada tahun 2002. Pada tahun 2003 pendapatan daerah Rp. 357.223.479,55 dan pengeluaran Rp. 348.659.939,79 tahun 2004 pendapatan daerah Rp. 373.132.453,10 dan pengeluaran daerah Rp. 351.188.875,87 tahun 2005 pendapatan daerah Rp. 391.630.897,62 dan pengeluaran Rp. 388.737.613,20 dari rasio perhitungan variabel efisiensi dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 adalah kurang efisien disebabkan realisasi pendapatan daerah dan pengeluaran daerah seimbang

disebabkan Kabupaten Karanganyar melaksanakan rencana pembangunan lagi untuk program yang belum tercapai.

**Tabel 4.6. Data Target APBD dan Realisasi APBD serta Perhitungan
Manajemen Keuangan Daerah Tahun 1990 – 2005**

Tahun	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Efektivitas (%)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1990	22.247.977,00	22.247.977,00	100,00	Efektif
1991	26.173.499,00	26.173.499,00	100,00	Efektif
1992	33.343.532,00	33.343.532,00	100,00	Efektif
1993	36.756.222,00	36.756.222,00	100,00	Efektif
1994	43.112.580.000,00	45.206.620.000,00	104,85	Sangat efektif
1995	54.948.039.800,00	57.446.830.300,00	104,54	Sangat efektif
1996	64.292.957.800,00	66.110.255.800,00	102,82	Sangat efektif
1997	78.464.373.030,00	76.941.743.950,00	98,05	Efektif
1998	126.469.851.000,00	130.827.777.874,00	103,44	Sangat efektif
1999	181.627.097.340,00	176.524.704.869,00	97,19	Efektif
2000	169.781.447.916,00	163.329.039.322,00	96,19	Efektif
2001	481.446.081.600,00	492.207.880.900,00	102,23	Sangat efektif

2002	573.887.634.000,00	215.005.723.497,00	40,27	Tidak efektif
2003	705.869.873.423,00	705.883.419.347,00	100,00	Efektif
2004	741.357.487.760,00	724.321.328.978,00	97,70	Efektif
2005	677.750.864.702,00	730.368.510.831,00	107,76	Sangat efektif

Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar

Target yang dicapai dalam perhitungan variabel efektivitas manajemen keuangan daerah adalah pada tahun 1990 target yang dicapai Rp. 22.247.977,00 dan realisasi Rp. 22.247.977,00 tahun 1991 target Rp. 26.173.499,00 dan realisasi Rp. 26.173.499,00 tahun 1992 target Rp. 33.343.532,00 dan realisasi Rp. 33.343.532,00 tahun 1993 target Rp. 36.756.222,00 dan realisasi Rp. 36.756.222,00 untuk rasio realisasi APBD dan target APBD tahun 1990 sampai tahun 1993 yaitu 100% dan efektif, hal ini disebabkan antara target APBD dan realisasi APBD tercapai seimbang.

Untuk tahun 1994 target yang dicapai Rp. 43.112.580.000,00 dan realisasi Rp. 43.206.620.000,00 tahun 1995 target Rp. 54.948.039.800,00 dan realisasi Rp. 57.446.830.300,00 tahun 1996 target Rp. 64.292.957.800,00 dan realisasi Rp. 66.110.255.800,00 sedangkan efektivitas yang dicapai untuk tahun 1994 adalah 104,8571% tahun 1995 adalah 104,5475% dan tahun 1996 adalah 102,8265% sehingga rasio realisasi APBD dan target APBD yaitu sangat efektif disebabkan realisasi APBD lebih besar dari target APBD.

Untuk tahun 1997 target Rp. 78.464.373.030,00 dan realisasi Rp. 76.941.743.950,00 tahun 1998 target Rp. 126.469.851.000,00 dan realisasi Rp. 130.827.777.874,00 tahun 1999 target Rp.

181.627.097.340,00 dan realisasi Rp. 176.524.704.869,00 sedangkan efektivitas yang dicapai tahun 1997 adalah Rp. 98,0594% tahun 1998 adalah Rp. 103,4458% tahun 1999 adalah 97,1907% sehingga pada tahun 1997 dan tahun 1999 rasio realisasi APBD dan target APBD adalah efektif, hal ini disebabkan antara target APBD dan realisasi APBD tercapai seimbang, kemudian untuk tahun 1998 efektivitas yang dicapai adalah 103,4458% sehingga rasio realisasi APBD dan target APBD adalah sangat efektif hal ini disebabkan realisasi APBD lebih besar dari target APBD.

Pada tahun 2000 target yang dicapai Rp. 169.781.447.916,00 dan realisasi Rp. 163.329.039.322,00 tahun 2001 target yang dicapai Rp. 481.446.081.600,00 dan realisasi Rp. 492.207.880.900,00 tahun 2002 target yang dicapai Rp. 573.887.634.000,00 dan realisasi Rp. 215.005.723.497,00 sedangkan efektivitas yang dicapai tahun 2000 adalah 96,1995% tahun 2001 adalah 102,2353% tahun 2002 adalah 40,2717% sehingga rasio realisasi APBD dan target APBD untuk tahun 2000 adalah efektif, hal ini disebabkan antara target APBD dan realisasi APBD tercapai seimbang, tahun 2001 rasio realisasi APBD tercapai lebih besar dari target APBD sehingga rasio realisasi APBD dan target APBD tercapai sangat efektif, tahun 2002 rasio realisasi APBD tercapai lebih kecil dari target APBD sehingga rasio APBD dan target APBD adalah tidak efektif.

Pada tahun 2003 target yang dicapai Rp. 705.869.873.423,00 dan realisasi Rp. 705.883.419.347,00 tahun 2004 target yang dicapai

Rp. 741.357.487.760,00 dan realisasi Rp. 724.321.328.978,00 tahun 2005 target yang dicapai Rp. 677.750.864.702,00 dan realisasi Rp. 730.368.510.831,00 untuk efektivitas yang dicapai yaitu tahun 2003 adalah 100,0019% tahun 2004 adalah 97,7020% tahun 2005 adalah 107,7635% sehingga pada tahun 2003 rasio realisasi APBD dan target APBD adalah efektif, hal ini disebabkan target APBD dan realisasi APBD tercapai seimbang, tahun 2004 rasio realisasi APBD dan target APBD adalah efektif, hal ini disebabkan target APBD dan realisasi APBD tercapai seimbang, tahun 2005 rasio realisasi APBD dan target APBD adalah sangat efektif, disebabkan karena tercapai realisasi APBD lebih besar dari target APBD.

C. Hasil Pengolahan Data

1. Hasil Pengolahan Data Pengaruh Efektivitas Manajemen

Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

a. Model Biasa

Dependent Variable: Y

Method: Least Squares

Date: 12/05/07 Time: 21:47

Sample: 1990 2005

Included observations: 16

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.440161	20.48657	-0.021485	0.9832

X1	0.096266	0.208313	0.462120	0.6511
R-squared	0.015025	Mean dependent var	8.916250	
Adjusted R-squared	-0.055331	S.D. dependent var	12.17053	
S.E. of regression	12.50270	Akaike info criterion	8.006234	
Sum squared resid	2188.444	Schwarz criterion	8.102808	
Log likelihood	-62.04987	F-statistic	0.213555	
Durbin-Watson stat	1.384522	Prob(F-statistic)	0.651095	

b. Model Logaritma

Dependent Variable: LY

Method: Least Squares

Date: 12/11/07 Time: 16:04

Sample: 1990 2005

Included observations: 15

Excluded observations: 1

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.131454	2.036084	-0.555701	0.5879
LX1	0.992515	1.028693	0.964830	0.3522
R-squared	0.066823	Mean dependent var	0.830502	
Adjusted R-squared	-0.004960	S.D. dependent var	0.398248	
S.E. of regression	0.399235	Akaike info criterion	1.125032	
Sum squared resid	2.072050	Schwarz criterion	1.219439	
Log likelihood	-6.437740	F-statistic	0.930897	
Durbin-Watson stat	1.277339	Prob(F-statistic)	0.352236	

2. Hasil Pengolahan Data Pengaruh Efisiensi Manajemen Keuangan Daerah
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

a. Model Biasa

Dependent Variable: Y

Method: Least Squares

Date: 12/05/07 Time: 21:47

Sample: 1990 2005

Included observations: 16

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-2.476041	18.50516	-0.133803	0.8955
X2	0.120197	0.192472	0.624490	0.5423
R-squared	0.027101	Mean dependent var	8.916250	
Adjusted R-squared	-0.042391	S.D. dependent var	12.17053	
S.E. of regression	12.42581	Akaike info criterion	7.993898	
Sum squared resid	2161.612	Schwarz criterion	8.090471	
Log likelihood	-61.95118	F-statistic	0.389987	
Durbin-Watson stat	1.378641	Prob(F-statistic)	0.542350	

b. Model Logaritma

Dependent Variable: LY

Method: Least Squares

Date: 12/11/07 Time: 16:05

Sample: 1990 2005

Included observations: 15

Excluded observations: 1

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.015117	1.773260	-0.572458	0.5768
LX2	0.939262	0.900928	1.042549	0.3162
R-squared	0.077157	Mean dependent var	0.830502	
Adjusted R-squared	0.006169	S.D. dependent var	0.398248	

S.E. of regression	0.397018	Akaike info criterion	1.113895
Sum squared resid	2.049102	Schwarz criterion	1.208302
Log likelihood	-6.354215	F-statistic	1.086909
Durbin-Watson stat	1.263740	Prob(F-statistic)	0.316158

3. Hasil Pengolahan Data Pengaruh Efektivitas dan Efisiensi Manajemen Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Dummy Variabel.

a. Model Biasa

Dependent Variable: Y

Method: Least Squares

Date: 12/11/07 Time: 16:01

Sample: 1990 2005

Included observations: 16

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	18.80469	19.57962	0.960421	0.3558
X1	0.539811	0.811882	0.664889	0.5187
X2	-0.570999	0.794086	-0.719065	0.4859
DUM	-16.47019	6.900210	-2.386912	0.0343
R-squared	0.353727	Mean dependent var	8.916250	
Adjusted R-squared	0.192159	S.D. dependent var	12.17053	
S.E. of regression	10.93887	Akaike info criterion	7.834840	
Sum squared resid	1435.907	Schwarz criterion	8.027987	

Log likelihood	-58.67872	F-statistic	2.189333
Durbin-Watson stat	2.161389	Prob(F-statistic)	0.142180

b. Model Logaritma

Dependent Variable: LY

Method: Least Squares

Date: 12/11/07 Time: 16:03

Sample: 1990 2005

Included observations: 15

Excluded observations: 1

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.343267	2.042553	-0.168058	0.8696
LX1	5.748346	6.156263	0.933740	0.3705
LX2	-5.044398	5.571318	-0.905423	0.3846
DUM	-0.594042	0.203428	-2.920158	0.0139
R-squared	0.486379	Mean dependent var		0.830502
Adjusted R-squared	0.346300	S.D. dependent var		0.398248
S.E. of regression	0.321991	Akaike info criterion		0.794590
Sum squared resid	1.140458	Schwarz criterion		0.983403
Log likelihood	-1.959423	F-statistic		3.472184
Durbin-Watson stat	2.402470	Prob(F-statistic)		0.054269

c. Model Biasa

Dependent Variable: Y

Method: Least Squares

Date: 12/05/07 Time: 21:34

Sample: 1990 2005

Included observations: 16

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-3.746597	205.0479	-0.018272	0.9858

DUM	9.155419	206.0231	0.044439	0.9654
X1	1.232143	2.758438	0.446681	0.6646
DX1	-1.672376	3.167547	-0.527972	0.6090
X2	-1.040565	1.144223	-0.909407	0.3845
DX2	1.468655	1.942845	0.755930	0.4671
R-squared	0.389315	Mean dependent var	8.916250	
Adjusted R-squared	0.083973	S.D. dependent var	12.17053	
S.E. of regression	11.64833	Akaike info criterion	8.028199	
Sum squared resid	1356.836	Schwarz criterion	8.317920	
Log likelihood	-58.22559	F-statistic	1.275011	
Durbin-Watson stat	2.361164	Prob(F-statistic)	0.346722	

d. Model Logaritma

Dependent Variable: LY

Method: Least Squares

Date: 12/05/07 Time: 21:26

Sample: 1990 2005

Included observations: 15

Excluded observations: 1

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-17.43454	28.13873	-0.619592	0.5509
DUM	17.38708	28.27538	0.614919	0.5538
LX1	18.32235	19.18767	0.954903	0.3646
DLX1	-17.15869	22.36719	-0.767136	0.4626
LX2	-9.096773	8.033723	-1.132324	0.2868
DLX2	8.232602	13.23176	0.622185	0.5493
R-squared	0.517905	Mean dependent var	0.830502	
Adjusted R-squared	0.250074	S.D. dependent var	0.398248	
S.E. of regression	0.344876	Akaike info criterion	0.997911	
Sum squared resid	1.070456	Schwarz criterion	1.281131	
Log likelihood	-1.484335	F-statistic	1.933704	
Durbin-Watson stat	2.472275	Prob(F-statistic)	0.183857	

e. Model Anova

Dependent Variable: Y

Method: Least Squares

Date: 02/10/08 Time: 11:44

Sample: 1990 2005

Included observations: 16

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	15.63125	3.660072	4.270749	0.0008
DUM	-13.43000	5.176124	-2.594606	0.0212
R-squared	0.324715	Mean dependent var	8.916250	
Adjusted R-squared	0.276480	S.D. dependent var	12.17053	
S.E. of regression	10.35225	Akaike info criterion	7.628753	
Sum squared resid	1500.367	Schwarz criterion	7.725327	
Log likelihood	-59.03002	F-statistic	6.731978	
Durbin-Watson stat	1.795364	Prob(F-statistic)	0.021199	

D. Hasil Pengujian Hipotesis

1. Hasil Uji Pengaruh Efektivitas Manajemen Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Berdasarkan pengolahan data bahwa efektivitas manajemen keuangan daerah (X1) diperoleh nilai yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) sebesar 0.096266 dan pengaruh tidak signifikan. Koefisien regresi X1 tidak signifikan, variabel independen (X1) belum naik satu unit maka akan menyebabkan kenaikan pertumbuhan ekonomi (Y) sebesar 0.096266. Dari nilai koefisien R-squared menunjukkan bahwa perubahan

variasi variabel independen terhadap variabel dependen dapat dijelaskan sebesar 0,015025.

Berdasarkan pengolahan data bahwa efektivitas manajemen keuangan daerah (LX1) diperoleh nilai positif terhadap pertumbuhan ekonomi (LY) sebesar 0.992515 dan pengaruh tidak signifikan. Koefisien regresi LX1 tidak signifikan, variabel independen (LX1) mengalami kenaikan satu tingkat dan variabel dependen (Y) meningkat. Dari nilai koefisien R-squared menunjukkan bahwa perubahan variasi variabel independen terhadap dependen dapat dijelaskan sebesar 0.066823.

2. Hasil Uji Pengaruh Efisiensi Manajemen Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Berdasarkan pengolahan data bahwa efisiensi manajemen keuangan daerah (X2) diperoleh nilai positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) sebesar 0.120197 dan pengaruh tidak signifikan. Koefisien regresi X2 tidak signifikan, variabel independen (X2) belum naik satu unit maka akan menyebabkan kenaikan pertumbuhan ekonomi (Y) sebesar 0.120197. Dari nilai koefisien R-squared menunjukkan bahwa perubahan variasi variabel independen terhadap dependen dapat dijelaskan sebesar 0.027101.

Berdasarkan pengolahan data bahwa efisiensi manajemen keuangan daerah (LX2) diperoleh nilai positif terhadap pertumbuhan ekonomi (LY) sebesar 0.939262 dan pengaruh tidak signifikan. Koefisien regresi LX2 tidak signifikan, variabel independen (LX2) mengalami

kenaikan satu tingkat dan variabel dependen (Y) meningkat. Dari nilai koefisien R-squared menunjukkan bahwa perubahan variasi variabel independen terhadap dependen dapat dijelaskan sebesar 0.077157.

3. Hasil Uji Pengaruh Efektivitas dan Efisiensi Manajemen Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Dummy Variabel.

Berdasarkan pengolahan data bahwa Dummy (DUM) diperoleh nilai negatif terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) sebesar -16.47019 dan pengaruh signifikan. Koefisien regresi X1, X2 tidak signifikan, koefisien regresi DUM signifikan, variabel independen (X1) belum naik satu unit maka akan menyebabkan kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 0.539811 variabel independen (X2) mengalami kenaikan satu tingkat dan pertumbuhan ekonomi (Y) menurun, variabel DUM menunjukkan bahwa peran krisis punya pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari nilai koefisien R-squared menunjukkan bahwa perubahan variasi variabel independen terhadap dependen dapat dijelaskan sebesar 0.353727.

Berdasarkan pengolahan data bahwa Dummy (DUM) diperoleh nilai negatif terhadap pertumbuhan ekonomi (LY) sebesar -0.594042 dan pengaruh signifikan. Koefisien regresi LX1, LX2 tidak signifikan, koefisien regresi DUM signifikan, variabel independen (LX1) mengalami kenaikan satu tingkat dan pertumbuhan ekonomi meningkat, variabel independen (LX2) mengalami kenaikan satu tingkat dan pertumbuhan ekonomi menurun, variabel DUM dilihat dari periode penggunaan dummy dimana ada pengaruh nyata dan signifikan era sebelum krisis terhadap

pertumbuhan ekonomi. Dari nilai koefisien R-squared menunjukkan bahwa perubahan variasi variabel independen terhadap dependen dapat dijelaskan sebesar 0.486379.

Berdasarkan pengolahan data bahwa variabel efektivitas manajemen keuangan daerah dengan Dummy Variabel (DX1) diperoleh nilai negatif terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) sebesar -1.672376 dan pengaruh tidak signifikan, koefisien regresi DX1 tidak signifikan, variabel independen (DX1) mengalami kenaikan satu tingkat dan pertumbuhan ekonomi menurun. Variabel efisiensi manajemen keuangan daerah dengan Dummy Variabel (DX2) diperoleh nilai positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) sebesar 1.468655 dan pengaruh tidak signifikan, koefisien regresi DX2 tidak signifikan, variabel independen (DX2) mengalami kenaikan satu tingkat dan pertumbuhan ekonomi meningkat. Dari nilai koefisien R-squared menunjukkan bahwa perubahan variasi variabel independen terhadap dependen dapat dijelaskan sebesar 0.389315.

Berdasarkan pengolahan data bahwa variabel efisiensi manajemen keuangan daerah dengan Dummy Variabel (DLX1) diperoleh nilai negatif terhadap pertumbuhan ekonomi (LY) sebesar -17.15869 dan pengaruh tidak signifikan, koefisien regresi DLX1 tidak signifikan, variabel independen (DLX1) mengalami kenaikan satu tingkat dan pertumbuhan ekonomi menurun. Variabel efisiensi manajemen keuangan daerah dengan Dummy Variabel (DLX2) diperoleh nilai positif terhadap pertumbuhan ekonomi (LY) sebesar 8.232602 dan pengaruh tidak signifikan, koefisien regresi DLX2 tidak signifikan, variabel independen (DLX2) mengalami

kenaikan satu tingkat dan pertumbuhan ekonomi meningkat. Dari nilai koefisien R-squared menunjukkan bahwa perubahan variasi variabel independen terhadap dependen dapat dijelaskan sebesar 0.517905.

Berdasarkan pengolahan data bahwa Dummy (DUM) diperoleh nilai negatif terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) sebesar -13.43000 dan pengaruh signifikan. Sebelum krisis ekonomi punya pengaruh nyata terhadap pertumbuhan ekonomi, setelah krisis ekonomi jika dilihat dari nilai tersebut ada pengaruh nyata variabel Dummy terhadap pertumbuhan ekonomi dimana setelah krisis terjadi penurunan sebesar -13.43000.

E. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh Efektivitas Manajemen Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Dari hasil pengolahan data dengan menggunakan analisis Eview untuk mengetahui pengaruh efektivitas manajemen keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, bahwa efektivitas manajemen keuangan daerah ada pengaruh tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari nilai koefisien R-squared menunjukkan bahwa perubahan variasi variabel independen terhadap dependen dapat dijelaskan sebesar 0.066823. Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian sebelumnya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Imron Rosyadi (2000), dalam penelitiannya yang menganalisis hubungan antara pengeluaran pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Kota Jambi selama periode 1979-1998, menyimpulkan bahwa selama periode penelitian terdapat pola

hubungan satu arah antara pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pembangunan, dalam jangka pendek pengeluaran pembangunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dalam jangka panjang pengeluaran pembangunan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dengan efektivitas manajemen keuangan daerah maka perencanaan anggaran dapat diperhatikan (1) Penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai; (2) Penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional (PPRI Nomor 58 Tahun 2005), Sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar. Secara aritmatik, pertumbuhan ekonomi secara makro dapat dihitung dari pertumbuhan yang disebabkan oleh modal, tenaga kerja, dan perubahan dalam produktivitas. Studi yang pernah dilakukan menunjukkan bahwa pertumbuhan modal merupakan faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu negara tertentu. Namun demikian, perubahan dalam produktivitaslah yang menjelaskan adanya perbedaan pertumbuhan antar negara. Sedangkan yang mempengaruhi produktivitas adalah kemajuan teknologi [*technological progreess*] (**World Bank, (1991: 4), dalam Mulyanto, 1999: 9**). Dengan variabel efektivitas manajemen keuangan daerah diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kabupaten karanganyar.

2. Pengaruh Efisiensi Manajemen Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi .

Dari hasil pengolahan data dengan menggunakan analisis Eview untuk mengetahui pengaruh efisiensi manajemen keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, bahwa efisiensi manajemen keuangan daerah ada pengaruh tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari nilai koefisien R-squared menunjukkan bahwa perubahan variasi variabel independen terhadap dependen dapat dijelaskan sebesar 0.077157. Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian sebelumnya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Supratman (2001), dalam penelitiannya yang menganalisis efisiensi dan efektivitas sistem pengelolaan keuangan di Propinsi DKI Jakarta, menyimpulkan bahwa tingkat koefisien korelasi (r) menunjukkan keeratan hubungan kedua variabel yaitu penerimaan dan pengeluaran rutin adalah 0.931 atau 93.1 persen dan koefisien determinasinya (r^2) sebesar 86.7 persen dan memiliki hubungan yang searah dan bernilai positif. Dengan efisiensi manajemen keuangan daerah kegiatan pemerintah Kabupaten Karanganyar telah mencapai sasaran (*output*) dengan biaya (*input*) yang terendah diperoleh hasil (*output*) yang diinginkan (H. Darsil, 2004: 88). Sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar.

3. Peran Krisis Ekonomi Dalam Pengaruh Efektivitas dan Efisiensi Manajemen Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Dari hasil pengolahan data dengan menggunakan analisis Eview untuk mengetahui peran krisis ekonomi dalam pengaruh efektivitas dan efisiensi manajemen keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, bahwa peran krisis ekonomi ada pengaruh tetapi tidak signifikan dalam

efektivitas dan efisiensi manajemen keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari nilai koefisien R-squared menunjukkan bahwa perubahan variasi variabel independen terhadap dependen dapat dijelaskan sebesar 0.517905. Bahwa peran krisis ekonomi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil ini relevan dengan hasil penelitian sebelumnya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Mulyanto (1999), dalam penelitiannya yang menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia, 1966-1995 (Pendekatan Teori Pertumbuhan Baru dengan Teknik Ekonometrika Modern), menyimpulkan bahwa dengan uji kointegrasi kelompok variabel kerangka ekonomi dan kelembagaan mempunyai pengaruh yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, demikian pula untuk variabel TOT (Indeks Nilai Tukar Ekspor dan Impor) dan variabel DUM (variabel Dummy dari Strategi Kebijakan Perdagangan). Dengan adanya krisis ekonomi kegiatan pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam mengurus keuangan daerah dilaksanakan untuk mencapai tujuan dengan biaya serendah-rendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya (**H. Darsil, 2004: 88**). Untuk kegiatan program Kabupaten Karanganyar yaitu sektor pertanian dan sektor industri. Di sektor pertanian apabila faktor-faktor suplai tersedia, maka volume produksi di sektor pertanian akan berkorelasi positif terhadap harga, harga naik akan membuat petani meningkatkan volume produksinya dan harga turun akan membuat petani menurunkan volume produksinya (**Tulus Tambunan, 2006: 348**). Di sektor industri dalam jangka panjang dan jangka pendek yang harus dilakukan adalah

meningkatkan pertumbuhan industri- industri kunci (**Tulus Tambunan, 2006: 93**). Untuk mendorong tumbuhnya berbagai macam industri dapat diterapkan program pemberdayaan ekonomi rakyat melalui pengembangan industri kecil dan menengah yang berbasis pada potensi dan sumber daya yang ada pada masing-masing daerah yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan agar basis industri yang akan diciptakan tidak banyak bergantung pada bahan baku yang berasal dari luar negeri (**Mulyanto, 1999: 296**).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Efektivitas manajemen keuangan daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karanganyar tetapi pengaruhnya tidak signifikan. Hal ini karena nilai R-squared sangat kecil adalah 0.066823 (< 10 %). Di Kabupaten Karanganyar faktor atau komponen utama untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan penanaman modal asing (PMA), produktivitas tenaga kerja dan kemajuan teknologi.
2. Efisiensi manajemen keuangan daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karanganyar tetapi pengaruhnya tidak signifikan. Hal ini karena nilai R-squared sangat kecil adalah 0.077157 (< 10 %). Di Kabupaten Karanganyar faktor atau komponen utama untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi yaitu dengan investasi infrastruktur ekonomi dan sosial.
3. Krisis ekonomi berperan dalam studi pengaruh efektivitas dan efisiensi manajemen keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karanganyar tetapi pengaruhnya tidak signifikan. Hal ini karena nilai R-squared sangat kecil adalah 0.517905 (< 100%). Namun demikian Krisis ekonomi berperan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karanganyar dan pengaruhnya signifikan. Hal ini sesuai dengan keadaan daerah di Kabupaten Karanganyar bahwa pada pertengahan tahun 1997 krisis yang terjadi telah menyebabkan turunnya pertumbuhan ekonomi menjadi -11,65% pada tahun 1998. Dan telah meningkat pada tahun 1999 (2,89%), tahun 2000 (4,51%), tahun 2001 (1,42%), tahun 2002 (3,19%), tahun 2003 (3,32%), tahun 2004 (4,03%) dan tahun 2005 (9,9%).

B. Saran

Berdasarkan pengolahan data dan kesimpulan diatas maka penulis dapat memberikan saran :

1. Untuk tercapainya peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karanganyar adalah dengan peningkatan variabel efektivitas dan efisiensi manajemen keuangan daerah. Untuk kinerja ekonomi daerah, peningkatan pendapatan daerah untuk target dan realisasi diharapkan dapat dimanfaatkan untuk pembangunan di semua sektor ekonomi di Kabupaten Karanganyar, sehingga PDRB meningkat dan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Maka diharapkan Kabupaten Karanganyar meningkatkan efektivitas manajemen keuangan daerah yaitu dengan meningkatkan realisasi pendapatan daerah yang kemudian diarahkan untuk peningkatan di sektor pertanian. yang terdiri dari sub sektor tanaman bahan makanan, sub sektor tanaman perkebunan rakyat, sub sektor tanaman perkebunan besar, sub sektor peternakan, sub sektor kehutanan, sub sektor perikanan, peningkatan di sektor pertambangan dan penggalan, peningkatan di sektor industri pengolahan, peningkatan di sektor listrik dan air minum, peningkatan di sektor bangunan/konstruksi, peningkatan di sektor perdagangan, peningkatan di sektor angkutan dan komunikasi, peningkatan di sektor lembaga keuangan, sewa bangunan dan jasa perusahaan, dan peningkatan di sektor jasa-jasa yang secara signifikan akan berpengaruh terhadap pembentukan

PDRB yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karanganyar.

2. Variabel manajemen keuangan daerah, pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar hendaknya berusaha mencapai kriteria penilaian kinerja anggaran dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen keuangan daerah. Diharapkan Kabupaten Karanganyar meningkatkan efisiensi manajemen keuangan daerah yaitu dengan meningkatkan pendapatan daerah dan mengefisienkan pengeluaran belanja daerah, pengeluaran belanja daerah diarahkan untuk peningkatan di sektor industri, pertanian dan pariwisata. Dengan pengeluaran belanja daerah di sektor industri yang secara signifikan akan berpengaruh terhadap hasil produksi yang akan dapat meningkatkan pendapatan daerah yang akan berpengaruh terhadap pembentukan PDRB yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karanganyar. Pengeluaran belanja daerah di sektor pertanian akan meningkatkan hasil pertanian yang secara langsung dapat meningkatkan pendapatan daerah yang secara signifikan akan berpengaruh terhadap pembentukan PDRB yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karanganyar. Belanja daerah yang dikeluarkan untuk sektor pariwisata akan meningkatkan wisatawan yang secara signifikan dapat meningkatkan pendapatan daerah yang berpengaruh terhadap pembentukan PDRB yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karanganyar.
3. Peran krisis ekonomi dalam efektivitas dan efisiensi manajemen keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten

Karanganyar diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yaitu dengan meningkatkan kinerja ekonomi daerah, yang ditetapkan langkah-langkah : (a). Strategi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi, (b). Strategi Peningkatan Kemakmuran Ekonomi, (c). Strategi Memperkuat Struktur Perekonomian. Oleh karena di Kabupaten Karanganyar diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen keuangan daerah baik sebelum krisis ekonomi maupun sesudah krisis ekonomi. Oleh karena itu di Kabupaten Karanganyar diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi baik sebelum krisis ekonomi maupun sesudah krisis ekonomi. Peningkatan efektivitas dan efisiensi manajemen keuangan daerah sebelum krisis ekonomi dan sesudah krisis ekonomi dapat meningkatkan realisasi pendapatan daerah dan mengurangi pengeluaran belanja daerah yang akan berpengaruh terhadap pembentukan PDRB yang secara signifikan akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karanganyar. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi baik sebelum krisis ekonomi maupun sesudah krisis ekonomi yaitu dengan meningkatkan PDRB yang terdiri dari 9 (sembilan) sektor ekonomi secara signifikan akan berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karanganyar.

C. Implikasi Penelitian

1. Implikasi Teoritik

Berdasarkan hasil pengolahan data, kesimpulan dan saran di atas maka yang dapat diberikan implikasi teoritik sebagai berikut :

Penambahan variabel dalam penelitian sehingga ke depannya penelitian lebih luas dan interpretasinya lebih baik. Beberapa contoh studi yang dapat digunakan sebagai acuan /referensi antara lain :

- 1) Analisis Peluang Peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Kaitannya dengan Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Inflasi di Kabupaten Sragen (Danung Catur Mahendra, 2004).
 - 2) Pengaruh Pendidikan Formal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Propinsi Jawa Tengah Tahun 1990-2002 (Eko Budi Utomo, 2006).
 - 3) Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi di Jawa Tengah Periode 1985-2005 (Muhammad Ikra, 2006).
- b. Regresi dengan Dummy sebagai Variabel Independen kedepannya dapat digunakan untuk penelitian. Peneliti seringkali berhadapan tidak hanya data kuantitatif (seperti pendapatan, out put, harga) tetapi juga data kualitatif (seperti jenis kelamin, suku, agama, perubahan kebijakan pemerintah, tingkat pendidikan). Sebagai referensi studi dapat digunakan model regresi terlampir.

2. Implikasi Kebijakan

Berdasarkan hasil pengolahan data, kesimpulan dan saran diatas maka penulis dapat memberikan implikasi kebijakan sebagai berikut :

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar hendaknya menentukan kebijakan dan langkah strategis guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen keuangan daerah pada periode mendatang.
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar hendaknya menentukan kebijakan dan langkah strategis guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada periode mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik, *Pendapatan Regional Kabupaten Karanganyar Tahun 1990*. Kantor BPS Kabupaten Karanganyar, Karanganyar.

_____, *Pendapatan Regional Kabupaten Karanganyar Tahun 1991*. Kantor BPS Kabupaten Karanganyar, Karanganyar.

_____, *Pendapatan Regional Kabupaten Karanganyar Tahun 1993*. Kantor BPS Kabupaten Karanganya, Karanganyar.

_____, *Pendapatan Regional Kabupaten Karanganyar Tahun 1995*. Kantor BPS Kabupaten Karanganyar, Karanganyar.

_____, *Pendapatan Regional Kabupaten Karanganyar Tahun 1997*. Kantor BPS Kabupaten Karanganyar, Karanganyar.

_____, *Pendapatan Regional Kabupaten Karanganyar Tahun 1999*. Kantor BPS Kabupaten Karanganyar, Karanganyar.

_____, *Pendapatan Regional Kabupaten Karanganyar Tahun 2001*. Kantor BPS Kabupaten Karanganyar, Karanganyar.

_____, *Pendapatan Regional Kabupaten Karanganyar Tahun 2003*. Kantor BPS Kabupaten Karanganyar, Karanganyar.

_____, *Pendapatan Regional Kabupaten Karanganyar Tahun 2005*. Kantor BPS Kabupaten Karanganyar, Karanganyar.

Badan Pusat Statistik, *Karanganyar Dalam Angka Tahun 1990*. Kantor BPS Kabupaten Karanganyar, Karanganyar.

_____, *Karanganyar Dalam Angka Tahun 1994*. Kantor BPS Kabupaten Karanganyar, Karanganyar.

_____, *Karanganyar Dalam Angka Tahun 1998*. Kantor BPS Kabupaten Karanganyar, Karanganyar.

_____, *Karanganyar Dalam Angka Tahun 2002*. Kantor BPS Kabupaten Karanganyar, Karanganyar.

_____, *Karanganyar Dalam Angka Tahun 2005*. Kantor BPS Kabupaten Karanganyar, Karanganyar.

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, *Potensi Daerah Kabupaten Karanganyar 1993*. Kantor Bappeda Kabupaten Karanganyar, Karanganyar.

_____, *Potensi Daerah Kabupaten Karanganyar 1998*. Kantor Bappeda Kabupaten Karanganyar, Karanganyar.

_____, *Potensi Daerah Kabupaten Karanganyar 2003*. Kantor Bappeda Kabupaten Karanganyar, Karanganyar.

_____, *Potensi Daerah Kabupaten Karanganyar 2005*. Kantor Bappeda Kabupaten Karanganyar, Karanganyar.

Cullis, John dan Jones, Philip (1992). “*Publik Finance and Publik Choice Analytical Perspectives*”, McGraw-Hill USA.

Damodar Gujarati (2006). *Ekonometrika Dasar (Terjemahan Sumarno Zain)*, Jakarta: Erlangga.

Danung Catur Mahendra (2006). Analisis Peluang Peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Dan Kaitannya Dengan Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Inflasi di Kabupaten Sragen, *Skripsi, Mahasiswa Fakultas Ekonomi UNS*. (Tidak dipublikasikan).

Eko Budi Utomo (2006). Pengaruh Pendidikan Formal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Propinsi Jawa Tengah Tahun 1990-2002, *Skripsi, Mahasiswa Fakultas Ekonomi UNS*. (Tidak dipublikasikan).

H. Darsil Munir (2004). *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: YPAPI.

Hari Murti (2002). “Analisis Transformasi Struktural Dan Basis Ekonomi Daerah Di Kabupaten Karanganyar”, *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan UNS*, Juli, Vol . 1, No. 1, hal. : 15-27.

Imron Rosyadi (2000). ***“Hubungan antara Pengeluaran Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Jambi selama periode 1979-1998”***, Tesis, Yogyakarta: UGM.

Intan Setyaningtias (2007). Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pemungutan Retribusi Pasar Serta Hubungannya Dengan Kelas Dan Jenis Pasar (Studi Kasus pada Pasar di Pemerintahan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006), ***Skripsi, Mahasiswa Fakultas Ekonomi UNS***. (Tidak dipublikasikan).

J. Sardi Karjoredjo (1999). ***Desentralisasi Pembangunan Daerah di Indonesia***. Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.

Kawengian. (2002). ***Analisis Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja dalam Sektor Pertanian dan Sektor Industri Guna Menentukan Strategi Pembangunan Ekonomi Irian Jaya***. Makalah Falsafah Sains, Program Pasca Sarjana / S3, Institut Pertanian Bogor.

Mardiasmo (2004), ***Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah***. Yogyakarta: Andi.

Machfud Sidik (2006). ***Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah***, [http: //www.google.com](http://www.google.com).

Mudrajad Kuncoro (2003). ***Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi***. Jakarta: Erlangga.

Mulyanto (1999a). “Identifikasi Variabel Makro Penentu Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (Pendekatan Teori Pertumbuhan Endogen dengan Teknik Kointegrasi dan Model Koreksi Kesalahan)”, *Tesis, Jakarta: Universitas Indonesia*.

_____, (1999b). “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, 1966-1995 (Pendekatan Teori Pertumbuhan Baru dengan Teknik Ekonometrika Modern)” , *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi UNS*, Januari-Maret, 1999, No. 14, hal. : 4-15.

M. Suparmoko (2000). *Keuangan Negara*. Yogyakarta: BPFE.

Muhammad Ikra (2006). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Dan Inflasi Di Jawa Tengah Periode 1985-2005, *Skripsi, Mahasiswa Fakultas Ekonomi UNS*. (Tidak dipublikasikan).

Nick Devas (1989). *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. (Terjemahan Masri Maris)*, Jakarta: Universitas Indonesia.

Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 2005*.

Soeharno (2006). *Ekonometrika*. Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Supratman (2001). “Efisiensi dan Efektivitas Sistem Pengelolaan Keuangan Di Propinsi DKI Jakarta ”, *Tesis*, Yogyakarta: UGM.

Todaro, Michael P. (2003). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Edisi Kedelapan, Jilid 1, Alih bahasa oleh Burhanuddin Abdullah dan Harris Munandar. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Tambunan, Tulus. (2006). *Perekonomian Indonesia Sejak Orde Lama Hingga Pasca Krisis*. Jakarta: Penerbit PT Pustaka Quantum Prima.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, *Tentang Pemerintahan Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437).

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, *Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438).

Lampiran 1. Data Target APBD dan Realisasi APBD serta Perhitungan

Manajemen Keuangan Daerah Tahun 1990 – 2005

Tahun	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Efektivitas (%)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1990	22.247.977,00	22.247.977,00	100,00	Efektif
1991	26.173.499,00	26.173.499,00	100,00	Efektif
1992	33.343.532,00	33.343.532,00	100,00	Efektif
1993	36.756.222,00	36.756.222,00	100,00	Efektif
1994	43.112.580.000,00	45.206.620.000,00	104,85	Sangat efektif
1995	54.948.039.800,00	57.446.830.300,00	104,54	Sangat efektif
1996	64.292.957.800,00	66.110.255.800,00	102,82	Sangat efektif
1997	78.464.373.030,00	76.941.743.950,00	98,05	Efektif
1998	126.469.851.000,00	130.827.777.874,00	103,44	Sangat efektif
1999	181.627.097.340,00	176.524.704.869,00	97,19	Efektif
2000	169.781.447.916,00	163.329.039.322,00	96,19	Efektif
2001	481.446.081.600,00	492.207.880.900,00	102,23	Sangat efektif
2002	573.887.634.000,00	215.005.723.497,00	40,27	Tidak efektif
2003	705.869.873.423,00	705.883.419.347,00	100,00	Efektif
2004	741.357.487.760,00	724.321.328.978,00	97,70	Efektif
2005	677.750.864.702,00	730.368.510.831,00	107,76	Sangat efektif

Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar

**Lampiran 2. Data Pendapatan Daerah dan Pengeluaran Belanja Daerah
serta
Perhitungan Efisiensi Manajemen Keuangan Daerah**

Tahun	Pendapatan Daerah (Rp.)	Pengeluaran (Rp.)	Efisiensi (%)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1990	11.430.584,00	10.817.391,00	94,6355	Kurang efisien
1991	13.232.772,00	12.940.724,00	97,7929	Kurang efisien
1992	16.826.363,00	16.517.169,00	98,1624	Kurang efisien
1993	18.737.633,00	18.046.001,00	96,3088	Kurang efisien
1994	21.818.242,00	23.388.378,00	107,1964	Tidak efisien
1995	27.980.706,00	29.466.124,30	105,3087	Tidak efisien
1996	31.261.513,00	34.848.742,80	111,4749	Tidak efisien
1997	38.565.358,26	38.416.358,68	99,6137	Kurang efisien
1998	66.766.181,12	64.109.102,00	96,0203	Kurang efisien
1999	90.323.040,50	85.601.664,36	94,7727	Kurang efisien
2000	83.832.297,42	79.496.741,90	94,8282	Kurang efisien
2001	253.490.644,73	238.712.245,18	94,1720	Kurang efisien
2002	253.490.644,73	89.277.017,20	35,2190	Sangat efisien
2003	357.223.479,55	348.659.939,79	97,6027	Kurang efisien
2004	373.132.453,10	351.188.875,87	94,1190	Kurang efisien
2005	391.630.897,62	388.737.613,20	99,2612	Kurang efisien

Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar

**Lampiran 3. Data Pertumbuhan Ekonomi, Efektivitas dan Efisiensi
Manajemen Keuangan Daerah**

obs	Y	X1	X2	DUM	LX1	LX2	X1B	X2B	LY
1990	19.38000	100.0000	94.63550	0.000000	2.000000	1.976100	1.000000	0.946355	1.287354
1991	18.52000	100.0000	97.79290	0.000000	2.000000	1.990300	1.000000	0.977929	1.267641
1992	44.78000	100.0000	98.16240	0.000000	2.000000	1.991900	1.000000	0.981624	1.651084
1993	6.220000	100.0000	96.30880	0.000000	2.000000	1.983700	1.000000	0.963088	0.793790
1994	17.39000	104.8571	107.1964	0.000000	2.020600	2.030200	1.048571	1.071964	1.240300
1995	7.020000	104.5475	105.3087	0.000000	2.019300	2.022500	1.045475	1.053087	0.846337
1996	7.970000	102.8265	111.4749	0.000000	2.012100	2.047200	1.028265	1.114749	0.901458
1997	3.770000	98.05940	99.61370	0.000000	1.991500	1.998300	0.980594	0.996137	0.576341
1998	-11.65000	103.4458	96.02030	1.000000	2.014700	1.982400	1.034458	0.960203	NA
1999	2.890000	97.19070	94.77270	1.000000	1.987600	1.976700	0.971907	0.947727	0.460898
2000	4.510000	96.19950	94.82820	1.000000	1.983200	1.976900	0.961995	0.948282	0.654177
2001	1.420000	102.2353	94.17200	1.000000	2.009600	1.973900	1.022353	0.941720	0.152288
2002	3.190000	40.27170	35.21900	1.000000	1.605000	1.546800	0.402717	0.352190	0.503791
2003	3.320000	100.0019	97.60270	1.000000	2.000000	1.989500	1.000019	0.976027	0.521138
2004	4.030000	97.70200	94.11900	1.000000	1.989900	1.973700	0.977020	0.941190	0.605305
2005	9.900000	107.7635	99.26120	1.000000	2.032500	1.996800	1.077635	0.992612	0.995635

Lampiran 4. Regresi dengan Dummy sebagai Variabel Independen

Regresi dengan Dummy sebagai Variabel Independen

Jenis Data:

1. Data Kuantitatif
2. Data Kualitatif

Data Kualitatif mengindikasikan kepemilikan atas karakteristik tertentu.

Metode untuk mengkuantifikasi data kualitatif adalah dengan membuat variabel memiliki nilai 1 dan 0 yang mengindikasikan kepemilikan karakteristik.

Variabel ini disebut dengan : variabel dummy, *indicator*, *binary*, *categorical*, *qualitative*, *dichotomous variable*

Pengukuran variabel dummy bersifat nominal

Model regresi yang mengandung satu atau lebih variabel dummy sebagai variabel penjelas disebut model analysis of variance (ANOVA).

Eksistensi variabel dummy dalam model regresi ANOVA bisa menyebabkan perubahan yaitu perubahan intersep atau parameter respon atau perubahan intersep dan parameter respon.

Perubahan parameter intersep

Karakteristik yang diwakili oleh variabel dummy dalam model regresi mempengaruhi intersep model regresi.

Contoh:

Model hubungan antara konsumsi dan pendapatan selama tahun 1980-

$$2006: \alpha_1 + \alpha_2 Y_t$$

$$t=1980-2006$$

Karena adanya krisis ekonomi tahun 1997, konsumsi menurun drastis.

Maka untuk mengakomodasi perubahan konsumsi akibat krisis (tahun 1997-1999) digunakan variabel dummy

Kondisi krisis ekonomi mempengaruhi konsumsi otonom

$D_t = 1$, jika $t = 1997-1999$

$D_t = 0$, jika t selain 1997-1999

Sehingga persamaan menjadi:

$$C_t = \alpha_{1t} + \alpha_2 Y_t \quad t = 1980-2006$$

$$\alpha_{1t} = \alpha_1 + \delta D_t$$

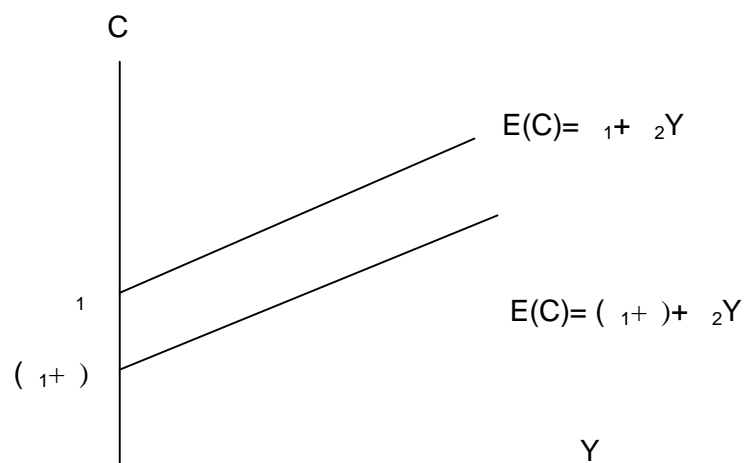
Dimana :

Efek dari memasukkan variabel dummy dalam model :

$$C_t = (\alpha_1 + \delta) + \alpha_2 Y_t \quad \text{jika } D_t = 1$$

$$C_t = \alpha_1 + \alpha_2 Y_t \quad \text{jika } D_t = 0$$

Perbedaan intersep antara kondisi krisis dan tidak krisis



Perubahan Parameter Respon

$$C_t = \alpha_1 + (\alpha_2 + \gamma) Y_t \quad t = 1980-2006$$

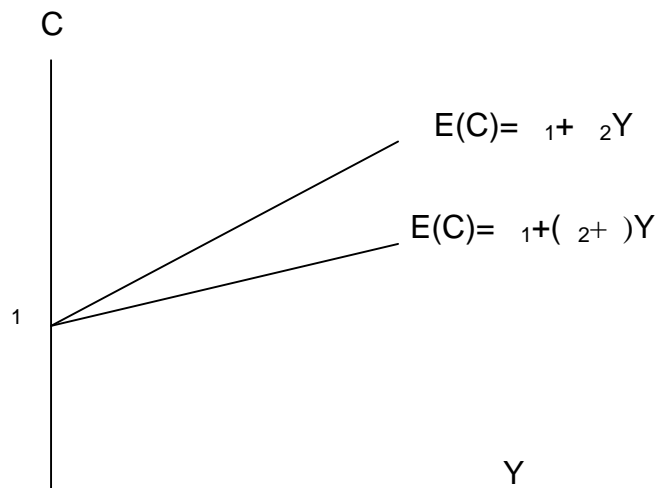
Variabel baru ($Y_t D_t$) disebut variabel interaksi (*interaction variable*) yang bisa bernilai nol jika $D_t=0$ atau sama dengan pendapatan (Y_t) jika $D_t=1$

Sehingga,

$$C_t = \alpha_1 + (\alpha_2 + \gamma)Y_t \quad \text{jika } D_t = 1$$

$$C_t = \alpha_1 + \alpha_2 Y_t \quad \text{jika } D_t = 0$$

Perubahan Parameter Respon

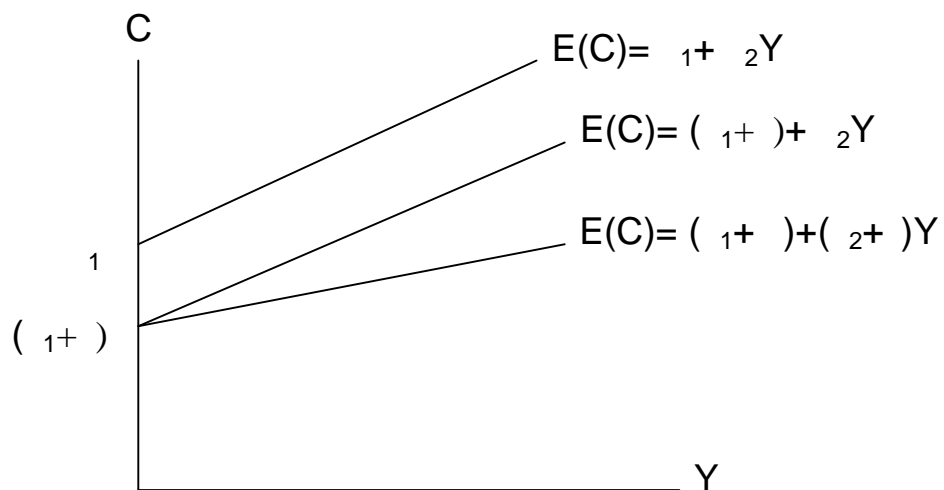


Perubahan Parameter Intersep dan Respon

Adanya krisis ekonomi dapat merubah konsumsi otonom dan MPC

Sehingga model ekonominya menjadi:

$$C_t = \alpha_1 + \delta D_t + \alpha_2 Y_t + \gamma(Y_t D_t) \quad t = 1980-2006$$



Kadang-kadang karakteristik kualitatif tidak hanya memiliki dua pilihan tetapi bisa lebih dari dua.

Hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan variabel dummy adalah adanya perangkat variabel dummy (*dummy variable trap*). Hal ini terjadi

bila semua pilihan dimasukkan dalam karakteristik kualitatif dan menimbulkan adanya kolinearitas sempurna.

Untuk menghindari *dummy variable trap* (Gujarati, 2003: 303)

1. Memasukkan dummy untuk setiap kategori dan menghilangkan intersep
2. Memasukkan intersep dan memasukkan dummy $(m-1)$ dimana m adalah jumlah kategori dummy variabel